

Lapetan Penelitian

**LEGALISASI PENGELOLA ZAKAT
DI KOTA MEDAN**

PENELITI :

Drs. Pangeran Harahap, MA

Dosen Fakultas Syari'ah UIN SU



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2016

Laporan Penelitian

LEGALISASI PENGELOLA ZAKAT

DI KOTA MEDAN

PENELITI :

Drs. Pangeran Harahap, MA

Dosen Fakultas Syari'ah UIN SU



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN

PADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, penulis ucapkan karena penelitian ini telah rampung peneliti lakukan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin.

Penelitian ini tentu banyak menemukan hambatan dan halangan dalam penelusuran berbagai sumber buku bacaan yang dianggap sebagai buku premier, namun karena keseriusan yang sangat dalam dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat relative panjang dari waktu yang telah ditentukan.

Semoga penelitian yang sangat sederhana ini mengenai **“Legalisasi Pengelola Zakat Di Kota Medan”**.

Dan semoga penelitian ini bermanfaat, bagi para peneliti yang lain yang tertarik dengan judul penelitian ini.

Akhirnya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan penelitian ini, penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Medan, 10 November 2016

Pangeran Harahap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kerangka Teori	8
C. Perumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Hasil Penelitian	14
F. Metode Penelitian	14
BAB II : TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Amil Zakat Menurut Peraturan Perundang- Undangan	21
B. Jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Propinsi Sumatera Utara	25
C. Panitia Amil Zakat Di Kota Medan Kaitannya Dengan Persyaratan Pembentukan Satu Lembaga Amil Zakat (LAZ)	30
D. Posisi Panitia/Amil Zakat BKM: Sebagai BAZ Atau LAZ	61
E. Solusi Bagi Masalah Pelegalan Panitia/Amil Zakat Masyarakat	73
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	82
DAFTAR BACAAN	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Rasulullah saw. bersabda:

بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر.¹

Artinya: Islam dibangun di atas lima dasar, yaitu: 1. bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. 2. mendirikan salat, 3. membayar zakat, 4. menunaikan haji, 5. puasa ramadan. (H.R. Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar).

Atas dasar itu, maka zakat merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Pentingnya arti dan kedudukan zakat itu dalam Islam sehingga tercatat dalam sejarah Islam, yaitu pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin yang pertama Abu Bakar ra. mempersamakan antara orang murtad dan orang yang tidak mau membayar zakat sebagai dua kelompok yang sama-sama harus diperangi. Zainuddin al-Malibari di dalam kitab "*Fath al-Mu'in*" menyebutkan bahwa orang yang menentang kewajiban zakat dihukumi kafir. Orang yang enggan menunaikannya diperangi dan

¹ Ahmad Hasymi Beik, *Mukhtar al-Ahadis an-Nabawiyah*, (Surabaya: Muhammad bin Ahmad bin Subhan, tt.) halaman 64.

dipungut zakat daripadanya secara paksa, sekalipun ia tidak memerangi.²

Sejak tahun kedua hijriah³ zakat diwajibkan kepada seorang muslim apabila padanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut: 1. merdeka, 2. Islam, 3. balig dan berakal, 4. mencukupi satu nisab, 5. harta tersebut milik sendiri secara sempurna, 6. sampai haul.⁴

Bagi orang yang terkategori wajib zakat, tatacara pelaksanaan penunaian kewajiban zakat mereka diatur oleh syari'at. Aturan tentang tatacara ini disebut dengan syarat menunaikan zakat. Adapun syarat menunaikan zakat itu ada dua; pertama adanya niat menyerahkan zakat hartanya. Kedua, menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahaqqin*), yaitu mereka yang termasuk di dalam delapan kelompok manusia (*asnaf*) seperti yang disebut dalam ayat 60 dari surat at-Taubah⁵ berikut:

² Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Jilid 2, (Kudus: Menara, 1979) halaman 1.

³ Pengwajibkan atau pensyariatan zakat dalam Islam dimulai pada tahun kedua hijriah, yaitu sesudah keparduan zakat fitrah. *Ibid*.

⁴ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) halaman 174. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), halaman 224.

⁵ Zainuddin al-Malibari, halaman 29 – 35.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Berkenaan dengan syarat kedua tersebut di atas, yaitu menyerahkan harta zakat kepada *mustahaqqin*, maka berdasarkan ketentuan isi ayat di atas, bahwa orang yang berhak menerima zakat (*mustahaqqin*) itu terdiri dari delapan golongan, yaitu; 1. *fakir*, 2. *miskin*, 3. *amil*, 4. *muallaf*, 5. *riqab*, 6. *gharim*, 7. *fi sabilillah*, 8. *ibn sabil*. Salah satu di antara kelompok/golongan yang berhak menerima zakat (*mustahaqqin*) tersebut di atas adalah orang atau mereka yang dipanggil dengan sebutan "*amil*". Amil di dalam kitab atau buku-buku kamus didefinisikan dengan "orang yang menerima atau mengumpulkan zakat"⁷ atau "orang atau badan (panitia) yang mengurus soal zakat dan sedekah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan atau membagikannya

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), halaman 288.

⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), halaman 36.

kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran Islam.⁸ Menurut istilah peraturan perundang-undangan, amil adalah organisasi atau institusi pengelola zakat.

Dalam kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir al-Wasit*,⁹ *Tafsir al-Kabir*,¹⁰ *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*,¹¹ *Ruh al-Ma'ani*,¹² dikemukakan bahwa pengelola zakat itu adalah orang atau lembaga yang diangkat atau ditugasi oleh pemerintah untuk menghimpun dan mengelola harta zakat dari para wajib zakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh para fuqaha (ulama fikih) seperti Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*,¹³ dan Zainuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in*.¹⁴ Di Indonesia, pada bulan september 1999 lewat UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, negara atau pemerintah telah menyediakan sarana berupa legalitas – yang diberi nama badan amil zakat dan lembaga amil zakat – bagi pengelola zakat untuk bekerja dan

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jilid 1, halaman 134.

⁹ Muhammad Said Tantowi, *At-Tafsir al-Wasit Li al-Qur'an al-Karim*, jilid 6 (Mesir: Dar an-Nahdah, 1998), halaman 326.

¹⁰ Fakhruddin al-Razy, *At-Tafsir al-Kabir*, Jilid 16 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990) halaman 91.

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 8, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967) halaman 178.

¹² Syihabuddin al-Alusi al-Bagdadi, *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), halaman 121.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), halaman 327.

¹⁴ Zainuddin al-Malibari, halaman 37.

karenanya dapat disebut sebagai *mustahik* serta dapat memperoleh bahagian dari harta zakat.¹⁵

Berdasarkan point-point ketentuan aturan serta fakta yang dikemukakan di atas terlihat suatu gambaran bahwa di satu sisi yaitu dari sisi hukum pengelola zakat itu disyaratkan harus ada pengangkatan atau pengukuhan dari pemerintah, dan negara atau pemerintah telah menyediakan/mengadakan atau melakukan upaya legalitas bagi para pengelola zakat di negeri ini. Namun di sisi lain masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Medan khususnya dari masa ke masa dalam waktu yang sudah cukup lama telah terbudaya pembentukan panitia amil zakat lewat badan kenaziran mesjid dalam rangka membantu para *muzakki* untuk mengelola zakatnya. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi sebab negara ini bukan negara Islam melainkan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, dan negara tidak ada membuat aturan bagi pelebagaan (pelegalan) amil-amil zakat di negeri ini. Dengan demikian tentu memadailah legalitas amil-amil zakat itu lewat *tauliyah* dari *ahl al-hilli wa al-'aqdi* (yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang sebahagian besarnya diwakili oleh badan-badan kenaziran masjid, yang dalam kebiasaan di masyarakat mereka sebagai pengemban tugas mengurus kepentingan umat di bidang

¹⁵ Menurut ketentuan pasal 3, 6 dan 7 dari UU No. 38 Tahun 1999 tersebut pengelola zakat (badan amil zakat dan lembaga amil zakat) diangkat oleh pemerintah.

ibadah dimana zakat dipahami dan dikategorikan sebagai bagian dari ibadah). Sekarang yang menjadi suatu problem adalah bahwa di negara ini (di Indonesia) pemerintah telah menyediakan perangkat aturan hukum lewat UU yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai wujud tauliyah imam (pendelegasian wewenang oleh pemerintah) kepada lembaga-lembaga amil zakat masyarakat, sehingga diharapkan lembaga-lembaga ini legal dan benar-benar berfungsi sebagai amil zakat, namun diduga kuat masyarakat belum melegalisasi organisasi pengelola-pengelola zakatnya (secara khusus panitia-panitia amil zakat fitrah), dan masih tetap mengandalkan model lama yaitu dibentuk dan diangkat oleh masyarakat (biasanya lewat badan kenaziran mesjid) saja, tanpa diangkat, dikukuhkan atau dilegalisasi oleh pemerintah.

Hal yang sangat penting lagi untuk digaris bawahi adalah bahwa sudah ada para muballig yang mengemukakan pendapat dan bimbingannya kepada para jamaah pengajiannya bahwa panitia-panitia amil zakat di masyarakat yang tidak diangkat atau dikukuhkan oleh pemerintah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, tidaklah dapat disebut atau dikategorikan sebagai amil zakat menurut fikih Islam. Oleh karenanya berakibat kepada tidak berhakannya panitia-panitia amil zakat tersebut memperoleh bahagian dari harta-harta zakat yang mereka kelola tersebut, sebab mereka bukan *asnaf* atau *mustahik*

¹¹ Menurut ketentuan pasal 3, 4 dan 7 dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (badan amil zakat dan lembaga amil zakat) dibentuk oleh pemerintah.

zakat. Pemahaman fikih dan bimbingan para muballig ini diduga kuat bisa cepat berkembang, dan mengambil akibat kepada terjadinya keresahan dikalangan umat yang awam khususnya berkenaan dengan pengelolaan zakat. Umpamanya menjadi agak sulit yang mau berpartisipasi untuk diangkat menjadi panitia amil zakat mengelola zakat-zakat masyarakat, sementara masyarakat sangat membutuhkan kepanitiaan tersebut dalam rangka memudahkan untuk membayarkan dan menyalurkan zakat mereka.

Atas dasar hal di atas, maka kami menganggap bahwa terhadap masalah pengelola zakat ini amat sangat penting untuk dilakukan penelitian, sebab melibatkan dan merugikan banyak orang (yang sebenarnya mereka ikhlas beramal, tapi bisa jadi tertutup oleh ketidak tahuan atau oleh hal lain), kemudian undang-undang yang mengaturnya telah berjalan lebih kurang 6 tahun, tapi masih sangat sedikit yang menggunakan. Terlebih-lebih lagi jika dikaitkan dengan pandangan fikih Islam yang diungkapkan di atas bahwa amil zakat itu harus yang diangkat atau dikukuhkan oleh pemerintah bilamana pemerintah memang telah mempersiapkan badan atau lembaganya, maka akan menjadi sesuatu hal yang fatal dari sudut tinjauan hukum Islam bisa terjadi kepada masyarakat pengelola zakat, yaitu jika mereka mengambil bahagian dari harta zakat tersebut, bahwa bahagian itu menurut hukum bisa haram bagi mereka karena mengambil dan memakan yang bukan hak

mereka. Dikatakan bukan hak mereka sebab mereka menurut hukum bukan amil zakat, padahal mereka telah bekerja dan melelahkan.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini berangkat dari suatu konsep bahwa amil zakat menurut fikih dan peraturan perundang-undangan diangkat atau dikukuhkan oleh pemerintah. Negara sendiri sejak tahun 1999 lewat UU No. 38 Tahun 1999 telah menyediakan sarana pengelola zakat (amil) sebagai pihak atau lembaga perpanjangan tangan pemerintah (imam) yang diberinya wewenang (*tauliyah*) untuk melakukan pengelolaan terhadap zakat umat di wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya tauliyah imam dalam hal amil zakat ini, seyogianya masyarakat sudah harus melegalsasikan amil-amil zakatnya. Sebab telah berlakulah konsep fikih dan peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, bahwa amil zakat itu (amil zakat yang legal itu) adalah amil zakat yang diangkat atau dikukuhkan oleh pemerintah. Sedang para pengelola zakat yang tidak diangkat atau dikukuhkan oleh pemerintah tidak dapat disebut atau dikategorikan sebagai amil zakat, kendatipun mereka atau masyarakat menyebut dirinya atau melekatkan label pada organisasinya sebutan amil zakat. Di lapangan sekarang ini ditemukan pengelola zakat yang diangkat atau dikukuhkan oleh pemerintah dan pengelola zakat yang tidak diangkat atau

dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam UU No. 38 Tahun 1999 pada bab III mengenai organisasi pengelolaan zakat, disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat itu dilakukan oleh: 1. Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah (pasal 6 ayat (1)). 2. Lembaga Amil Zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah (pasal 7 ayat (1)). Kedua institusi tersebut merupakan fakta yang masing-masing punya data yang mungkin untuk ditelusuri dan ditemukan faktor-faktor pendorong bagi legalnya, dan terutama faktor yang menjadi kendala bagi organisasi pengelola zakat yang belum terlegalkan.

Dalam hal lembaga-lembaga amil zakat yang tidak diangkat atau tidak dikukuhkan oleh pemerintah – dan ini merupakan bagian terbesar dibanding yang legal – sudah barang tentu ada yang menjadi penyebabnya. Secara logika alamiah setelah membaca peraturan tentang pengelola zakat dan memperhatikan kecenderungan budaya masyarakat, ada dua kemungkinan kendala bagi legalisasi organisasi pengelola zakat ini. Pertama beratnya syarat yang harus dipenuhi oleh organisasi pengelola zakat untuk proses legalisasi. Kedua bahwa adanya budaya pemahaman (pandangan) masyarakat dimana model lama yaitu pengelola zakat yang dibentuk dan diangkat oleh masyarakat telah legal menurut hukum Islam, jadi tidak perlu proses legalisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus mengenai lembaga amil zakat, bahwa pengukuhan dilakukan oleh pemerintah, yaitu; di Pusat oleh Menteri Agama, dan di Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (pasal 21 Keputusan Menteri Agama RI. No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999). Untuk tingkat Kota dan Kabupaten, termasuk Kota Medan sebagai wilayah penelitian yang merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Utara, lembaga amil zakatnya dikukuhkan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara. Akan tetapi pengukuhan terhadap lembaga amil zakat tersebut, dapat dan akan dilakukan oleh pemerintah tentu jika telah memenuhi persyaratan (pasal 22 huruf c Kept. Menag. No. 373 Tahun 2003).

Dengan mengetahui konsep tentang kehendak aturan dalam hal proses legalisasi lembaga amil zakat itu yaitu lewat pintu Kantor Wilayah Departemen Agama, maka tentu arah pelacakan pertama mengenai lembaga amil zakat yang legal dan yang tidak legal itu kesana. Sebab di kantor ini data itu pasti ada. Dari Kanwil Depag kemudian pelacakan tentu diarahkan ke lembaga-lembaga amil zakat yang belum terlegalisasi yang ada di masyarakat, sebab di sana pasti ada data berupa penyebab mengapa mereka tidak melegalisasikan lembaga amil zakatnya. Bisa jadi penyebabnya itu seperti yang dikonsepsikan di atas atau lebih berkembang dengan ada atau munculnya beberapa penyebab lainnya. Sekaligus juga

akan didapatkan gambaran tentang dimana posisi panitia zakat masyarakat (yang dibentuk lewat BKM-BKM) di Kota Medan ini menurut hukum.

Kemudian, jika telah ditemukan penyebabnya seperti yang dikonsepsikan di atas atau ditambah dengan pengembangannya, maka pertama bahwa terhadap penghalang oleh karena peraturan perundang-undangan yaitu berupa persyaratan, dapat dipastikan bahwa lewat jalan ini tertutup proses pelegalan. Kedua bahwa ada dua kemungkinan yang dapat diprediksi sebagai tawaran solusi bagi legalisasi organisasi pengelola zakat ini, pertama dengan melakukan revisi terhadap rumusan pasal-pasal UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan terhadap Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 khususnya mengenai persyaratan untuk proses legalisasinya. Kedua, bahwa organisasi-organisasi pengelola zakat yang ada di masjid-masjid dan musholla tersebut dijadikan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 pasal 1 angka 3 bahwa UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan. Dan pada pasal 8 disebutkan: "untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk UPZ". Secara lebih tegas lagi dicantumkan dalam rumusan peraturan yang berupa Keputusan Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat pasal 9 ayat (5) "Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat di tiap-tiap Desa/Kelurahan".

Dengan demikian, secara terperinci dan singkat di sini dapat disimpulkan bahwa gambaran tentang masalah dan solusi bagi masalah tersebut di atas akan didapatkan dengan menelusuri: 1. jumlah lembaga amil zakat (laz) Propinsi Sumatera Utara, untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan masyarakat di Kota Medan dapat melaksanakan kehendak dari Undang-Undang tentang zakat. 2. Kantor Urusan Agama kecamatan di Kota Medan, guna mengetahui jumlah pengumpulan dana zakat oleh panitia-panitia zakat di masjid dari setiap kelurahan, panitia zakat di bawah BKM yang menempuh suatu upaya pelegalan amil zakatnya lewat pen-SK-an oleh KUA, dan apakah telah terbentuk BAZ dengan UPZnya. 3. beberapa panitia amil zakat fitrah masyarakat (bentukan BKM) yang diperkirakan sebagai bagian kelompok terbesar jumlah pengumpulan zakatnya, untuk mengetahui dimungkinkan terpenuhi tidaknya syarat untuk dikukuhkan pemerintah lembaga tersebut.

Jika diketahui LAZ propinsi hanya sedikit, maka mayoritas panitia amil zakat fitrah (khususnya) yang ada dalam masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelegalannya tidak lewat jalur LAZ, tetapi dimungkinkan lewat jalur BAZ sebagai UPZ. Jika

diketahui tidak ada yang menggunakan jalur BAZ yaitu sebagai UPZ, maka dapatlah disimpulkan bahwa panitia-panitia zakat (khususnya zakat fitrah) di Kota Medan ini jika adapun yang berupaya melakukan pelegalan adalah dengan hanya meminta pengesahan dari KUA. Sementara pelegalan oleh KUA tidak sah menurut hukum. Sebab yang berwenang melegalkan menurut hukum adalah Gubernur untuk LAZ, dan BAZ kecamatan untuk UPZ. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa mereka tidak dapat disebut sebagai amil zakat menurut hukum. Jika bukan amil, maka mereka tentu tidak berhak memperoleh bahagian. Oleh karena itu perlu dicarikan dan ditunjukkan solusinya.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Mengapa pengelola-pengelola zakat (lembaga-lembaga amil zakat) yang belum legal di Kota Medan ini belum melegalisasikan organisasinya. Dan bagaimana legalitas kepanitiaannya menurut hukum.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang berbagai faktor dan alasan mengapa lembaga-lembaga amil zakat yang tidak

diketahui tidak ada yang menggunakan jalur BAZ yaitu sebagai UBA, maka dapatlah disimpulkan bahwa panitia-panitia zakat (khususnya zakat fitrah) di Kota Medan ini jika ada pun yang berupaya melakukan kegiatan adalah dengan hanya meminta pengesahan dari KUA. Sementara kegiatan oleh KUA tidak sah menurut hukum. Sebab yang bertanggung melakukan menurut hukum adalah Gubernur untuk LAZ, dan BAZ kecamatan untuk UBA. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa mereka tidak dapat disebut sebagai amil zakat menurut hukum. Jika bukan amil, maka mereka tentu tidak berhak memperoleh bagian. Oleh karena itu perlu diberikan dan ditunjukkan solusinya.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut. Mengapa pengelola-pengelola zakat (lembaga-lembaga amil zakat) yang belum legal di Kota Medan ini belum melegitimasi organisasinya. Dan bagaimana legitimasi legitimasinya menurut hukum.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui gambaran tentang berbagai faktor dan situasi mengapa lembaga-lembaga amil zakat yang tidak

terlegalisasi yang ada di masyarakat kota Medan ini belum terlegalisasikan.

2. Setelah diketahui faktor dan alasan belum atau tidak terlegalisasikannya lembaga-lembaga amil zakat itu, tindak lanjutnya untuk dapat memilih tawaran solusi bagi masalah pelegalisasian lembaga-lembaga amil zakat di masyarakat tersebut.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Diharapkan berguna bagi para pengelola zakat di Kota Medan untuk dapat menyadari pentingnya legalisasi organisasi mereka, dan selanjutnya berupaya melegitimasi.
2. Diharapkan dapat berguna bagi para pengambil kebijakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk mencari dan memberi solusi bagi proses legalisasi organisasi-organisasi pengelola zakat, bila perlu untuk mengadakan revisi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan prosedur legalisasi organisasi dan institusi pengelola zakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Masalah zakat adalah masalah hukum Islam yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat muslim keseluruhan, dan masyarakat muslim Kota Medan secara khusus. Pengaturan

pelaksanaannya terutama untuk pengelolaannya membutuhkan aturan negara. Penelitian hukum untuk kajian seperti ini disebut penelitian hukum sosiologis atau *socio-legal research*.¹⁶ Oleh karenanya salah satu pendekatan yang bisa digunakan, bahkan mungkin lebih tepat, adalah pendekatan kualitatif.

2. Konsep Dan Definisi Kerja

Legalitas berasal dari kata "*legaal*" (Belanda), "*legal*" (Inggeris), yang memiliki arti sah atau menurut undang-undang.¹⁷ Maka legalitas berarti keabsahan, atau diakui oleh undang-undang. Sedang legalisasi maksudnya adalah upaya atau proses pengesahan atau pengakuan oleh undang-undang. Di Kota Medan ini, lembaga amil zakat itu ada yang sudah legal (diakui oleh undang-undang) dan ada – jumlah ini mayoritas – yang belum terlegalisasikan. Dengan demikian, yang akan diteliti adalah faktor-faktor dan alasan yang menjadi penyebab tidak terlegalisasinya organisasi-organisasi pengelola zakat (lembaga amil zakat) di Kota Medan. Pengelola zakat adalah organisasi yang berkegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi

¹⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dan Metode-Metode Kajiannya*, Makalah Pembinaan Tenaga Peneliti, BPHN, Jakarta, 1980, halaman 41.

¹⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), halaman 549.

pengumpulan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Organisasi ini diberi nama oleh undang-undang dengan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.¹⁸ Jadi yang hendak dikejar faktor dan alasan yang menjadi penyebab terkendala dalam proses legalitasnya adalah pengelola zakat yang bukan badan amil zakat (baz), juga bukan lembaga amil zakat (laz) yang sudah legal atau prosedural. Sebab baik badan amil zakat (baz) maupun lembaga amil zakat (laz), kesemuanya itu sudah legal dan tentu badan atau lembaganya juga para pelaksananya (amilnya) menurut hukum disebut dan diposisikan sebagai amil, dan karenanya mereka berhak mendapat bahagian harta zakat. Terhadap Baz dan Laz yang sudah legal tersebut tak ada masalah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi bagi penelitian ini adalah Kota Medan. Dipilih Kota Medan sebab di daerah ini ada lembaga amil zakat yang sudah prosedural atau terlegalisasi, dan cukup banyak yang belum prosedural (belum terlegalisasi). Dengan demikian, data penelitian yang diinginkan dan dibutuhkan sebagaimana yang dituntut oleh judul dan masalah penelitian, di Kota Medan ini sangat banyak dan cukup. Disamping data yang

¹⁸ Konsep tersebut dapat dilihat dalam ketentuan rumusan pasal 3, 6, dan 7 UU. No. 38 Tahun 1999. dapat dibandingkan dengan pengertian dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh fuqaha' dalam kitab-kitab fikih mereka.

diperkirakan cukup banyak, juga ia mudah terjangkau, serta bisa ditekan jumlah dana serta dapat termaksimalkan waktu dalam mengerjakan penelitian.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tertier. Sumber data primernya adalah pejabat Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara yang membidangi urusan zakat, pejabat Kantor Departemen Agama Kota Medan, Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Medan, para pengelola zakat (lembaga amil zakat) yang belum terlegalisasi, dan bahan-bahan hukum dari aspek legalnya.

Bahan hukum¹⁹ terdiri dari:

a. Bahan hukum Primer:

- 1). UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
- 2). Keputusan Menteri Agama RI. No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999.

¹⁹ Dalam penelitian hukum, istilah data tidak dikenal. Yang dipakai dan digunakan adalah sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum itu dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2006), halaman 141. Oleh karena dalam penelitian ini ada yang berkenaan dengan kajian hukum atau aspek legalnya, maka khusus untuk kajian aspek legalnya ini, yaitu yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, maka digunakanlah istilah yang dikenal dalam penelitian hukum yaitu sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum. Baik bahan hkm primer, maupun bahan hukum sekunder, dan ditambah lagi dengan bahan hukum tertier.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab-kitab fikih yang membahas amil zakat. Kemudian buku-buku hukum yang membahas dan mengomentari peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, serta buku-buku penelitian khususnya tentang penelitian hukum. Hal ini sekaligus merupakan sumber data sekundernya penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku kamus atau ensiklopedi. Dan ini pulalah sekaligus yang menjadi sumber data tertiernya penelitian ini.

Pengumpulan data dari para pengelola zakat dan pejabat terkait, dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview). Sedang pengumpulan data dari bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara membaca dan mencatatnya di berbagai tempat yang bahan tersebut berada, seperti perpustakaan.

5. Pengolahan Dan Analisa Data

Data-data dan bahan hukum yang telah terkumpulkan, baik ia sebagai hasil wawancara dan observasi maupun catatan-catatan yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan, kesemuanya diolah dan dianalisa secara kualitatif. Oleh karena pengolahan dan analisa terhadap datanya dilakukan secara kualitatif, maka proses dan kerja menganalisis datanya itu telah dimulai sejak dari awal dilakukan atau dilaksanakan

pengumpulan data.²⁰ Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghindari bertumpuknya data yang dapat mempersulit pemahaman kembali akan makna bila dihubungkan dengan masalah penelitian.

6. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah lembaga-lembaga amil zakat di Kota Medan yang belum terlegalisasi. Dari – perkiraan – puluhan bahkan ratusan lembaga amil zakat yang belum terlegalisasi di Kota Medan ini, dipilih beberapa lembaga amil zakat saja dengan kriteria sebagai berikut: a. pembukuan tentang jumlah muzakki dan jumlah zakatnya ada minimal satu tahun terakhir, b. jumlah zakatnya terbesar. Dengan kriteria seperti ini, diperkirakan subjek masih cukup banyak, maka untuk lebih efisiennya tenaga, waktu, dan dana, serta dengan pertimbangan oleh karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jumlah subjek penelitian tidak ditentukan dan tidak dibatasi melainkan dibiarkan ia berjalan menelusuri sumber-sumber data yang ada sampai berhenti pada titik jenuh.

7. Jadwal Penelitian

Pengerjaan penelitian ini sejak dari awal sampai dengan seminar hasil membutuhkan waktu lebih kurang selama empat

²⁰ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), halaman 213.

pengumpulan data²⁰ Hal ini dimaksudkan sebagai upaya
menghindari bertumpuknya data yang dapat mempersulit
pemahaman kembali akan makna bila dihubungkan dengan
masalah penelitian.

6. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah lembaga-lembaga amil
zakat di Kota Medan yang belum terorganisasi. Dari – penelitian
– puluhan bahkan ratusan lembaga amil zakat yang belum
terorganisasi di Kota Medan ini, dipilih beberapa lembaga amil
zakat saja dengan kriteria sebagai berikut: a. pembekuan
tentang jumlah muzakki dan jumlah zakatnya ada minimal satu
tahun terakhir, b. jumlah zakatnya terbesar. Dengan kriteria
seperti ini, diperkirakan subjek masih cukup banyak, maka
untuk lebih efisiensi tenaga, waktu, dan dana, serta dengan
pertimbangan oleh karena pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif, jumlah subjek penelitian tidak
ditentukan dan tidak dibatasi melainkan diberikan is pilihan
menelusuri sumber-sumber data yang ada sampai berhenti
pada titik jenuh.

7. Jadwal Penelitian

Pengertian penelitian ini sejak dari awal sampai dengan
seminar hasil membutuhkan waktu lebih kurang selama empat

bulan. Dimulai pada awal bulan juni tahun 2006 dan berakhir
pada akhir bulan september tahun 2006.

8. Seminar Hasil

A. Hasil dari penelitian dituangkan dalam kertas kerja laporan
hasil penelitian. Agar laporan hasil penelitian ini memiliki
validitas yang baik, maka terhadapnya diadakan seminar
sebagai tahap terakhir dari kegiatan penelitian. Dari seminar
tersebut diperoleh berbagai masukan, sehingga dengannya
terlengkapi dan tersempurnakan laporan hasil penelitian ini.

pemerintah (pasal 6 ayat (1)), dan lembaga amil zakat yang
dikukuhkan, dibentuk, dan dilindungi oleh pemerintah (pasal 7 ayat
(1)).

Berdasarkan rumusan UU tersebut di atas, dipahami bahwa
yang dapat disebut sebagai amil zakat di negara Indonesia hanya
ada dua yaitu: 1. Badan Amil Zakat yang biasa disingkat dengan
BAZ, 2. Lembaga Amil Zakat yang biasa disingkat dengan LAZ.
Kedua lembaga ini merupakan dua badan dan lembaga yang diberi
kewenangan atau wewenang oleh pemerintah untuk mengumpulkan,
mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan
ketentuan agama. Jika demikian halnya, maka simpulan paham
yang tidak mungkin untuk disebut amil zakat adalah badan atau
badan atau lembaga yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai
lembaga tersebut. Oleh karena itu, lembaga amil zakat menurut
hukum

²⁰ Hidayat Nawawi dan Mariani Hidayat, Instrumen Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), halaman 213.

BAB II

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Amil Zakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam penjelasan pasal demi pasal UU No. 38 Tahun 1999 yaitu pada penjelasan pasal 3 disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga”. Adapun pengelola zakat dimaksud di atas adalah badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah (pasal 6 ayat (1)), dan lembaga amil zakat yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah (pasal 7 ayat (1)).

Berdasarkan rumusan UU tersebut di atas, dipahami bahwa yang dapat disebut sebagai amil zakat di negara Indonesia hanya ada dua yaitu; 1. Badan Amil Zakat yang biasa disingkat dengan BAZ. 2. Lembaga Amil Zakat yang biasa disingkat dengan LAZ. Kedua lembaga ini merupakan dua badan dan lembaga yang diberi kewenangan atau tauliyah oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Jika demikianlah halnya, maka simpulan paham hukumnya adalah bahwa semua bentuk kepanitiaan zakat yang tidak bisa dikategorikan ke dalam salah satu dua badan dan lembaga tersebut tidaklah dapat disebut amil zakat menurut hukum.

Dengan ketentuan aturan hukum tentang pengelolaan zakat tersebut diatas, berikut juga berdasarkan hasil simpulan paham hukum yang dilahirkan darinya, maka hal itu memberi arti bahwa telah lahir suatu paradigma baru pengelolaan zakat di Indonesia. Paradigma baru dimaksud adalah bahwa undang-undang negara Republik Indonesia telah membuat suatu aturan yang mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk langsung oleh pemerintah, dan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, tapi harus dikukuhkan atau ditauliyahkan oleh pemerintah. Disebut paradigma baru, sebab sebelumnya tidak ada.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 737 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama (pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 373). Berkenaan dengan amil zakat dalam kategori Badan Amil Zakat (BAZ), bahwa dalam hal pembentukan, pengangkatan atau

pentauiyahan dilakukan oleh pemerintah, yaitu oleh: 1. Presiden atas usul Menteri untuk tingkat nasional. 2. Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk tingkat propinsi. 3. Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk tingkat Kabupaten atau Kota. 4. Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk tingkat kecamatan (pasal 6 ayat (2) UU No. 38 Tahun 1999).

Adapun yang berkenaan dengan amil zakat dalam kategori lembaga amil zakat (LAZ), bahwa ia merupakan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, kemudian dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah (pasal 7 ayat (1) dan penjelasannya, UU No. 38 Tahun 1999). Pemerintah yang mengukuhkan atau yang memberi tauiyah dimaksud oleh UU tersebut di atas adalah: 1. Oleh Menteri Agama untuk LAZ pusat/nasional. 2. Oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk daerah atau tingkat propinsi. Maka untuk LAZ hanya ada dua tingkatan, yaitu tingkat pusat/nasional dan tingkat propinsi, dengan dua pula institusi pemerintah yang mengukuhkan atau mentauiyahkannya, yaitu untuk masing-masingnya Menteri Agama dan Gubernur Kepala Daerah setempat (pasal 21 Kep. Menag. No.373 Thn.2003). Dalam hal pengukuhan atau pentauiyahannya, bahwa lembaga amil

zakat tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri (pasal 7 ayat (2) UU No.38 Tahun 1999).

Panitia-panitia amil zakat yang diteliti adalah panitia-panitia amil zakat Kota Medan. Dengan demikian, dari segi wilayah atau tingkatan, ia merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) propinsi, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Propinsi Sumatera Utara. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat tingkat propinsi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. berbadan hukum;
2. memiliki data muzakki dan mustahiq;
3. telah beroperasi minimal selama dua tahun;
4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir;
5. memiliki wilayah operasional minimal 40% dan jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi tempat lembaga berada;
6. mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat;
7. telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun;
8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan diaudit oleh akuntan publik;

9. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi wilayah operasional. (pasal 22 huruf c Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 373 Tahun 2003). Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 439 Tahun 2001, tanggal 8 Oktober 2001.

B. Jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Propinsi Sumatera Utara

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa kehadiran UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu yang mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat di indonesia dilakukan oleh dua macam badan dan lembaga. Pertama Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk langsung oleh pemerintah. Kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dengan pengukuhan atau diberi tauliyah oleh pemerintah.

Atas dasar aturan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang telah melahirkan paradigma baru itu di Indonesia seperti disebutkan di atas, mengharuskan semua badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) yang ada untuk menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang tersebut. Menurut data yang tercatat oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI. tahun 2005, bahwa sejak terbitnya UU

Jakarta pada tanggal 26 Februari 2001 dan dikukuhkan dengan

Nomor 38 Tahun 1999 telah 16 LAZ tingkat pusat yang dikukuhkan, yaitu:

1. LAZ Dompot Dhuafa Republika (LAZ DD), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 15 November 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 439 Tahun 2001, tanggal 8 Oktober 2001.
2. LAZ Yayasan Amanah Takaful, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1998 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 440 Tahun 2001, tanggal 8 Oktober 2001.
3. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1999 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 441 Tahun 2001, tanggal 8 Oktober 2000.
4. LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 481 Tahun 2001, tanggal 7 November 2001.
5. LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Fallah, yang didirikan di Surabaya pada tanggal 19 Juli 1995 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 523 Tahun 2001, tanggal 10 Desember 2001.
6. LAZ Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2001 dan dikukuhkan dengan

- Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 538 Tahun 2001, tanggal 27 Desember 2001.
7. LAZ Yayasan Persatuan Islam (PERSIS), yang didirikan di Bandung pada tahun 1990 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 552 tahun 2001, tanggal 31 Desember 2001.
 8. LAZ Baitul Maal Umat Islam (BAMUIS Bank BNI), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1967 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 330 tahun 2002, tanggal 20 Juni 2002.
 9. LAZ Bangun Sjahtera Mitra Umat, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2001 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 406 Tahun 2002, tanggal 17 September 2002.
 10. LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Maret tahun 2002 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 407 tahun 2002, tanggal 6 Nopember 2002.
 11. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2001 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 445 tahun 2002, tanggal 6 Nopember 2002.
 12. LAZIS PP Muhammadiyah (LAZIS Muh.), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1914 dan dikukuhkan dengan

- Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 442 tahun 2001, tanggal 8 Oktober 2001 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 457 tahun 2002, tanggal 21 Nopember 2002.
13. LAZ Baitul Maal wat Tamwil (LAZNAS BMT), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 18 Nopember 2002 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI. Nomor 468 tahun 2002, tanggal 28 Nopember 2002.
14. LAZ Dompot Sosial Ummul Quro' (DSUQ), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2001 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 157 tahun 2003, tanggal 18 Maret 2003.
15. LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Pebruari 1992 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 410 tahun 2004, tanggal 13 Oktober 2004.
16. LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, didirikan di Bandung pada tanggal 28 juni 2002 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 410 tahun 2004, tanggal 13 Oktober 2004.²¹

²¹ Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI., *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI., 2005). Halaman 12-15.

Sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk tingkat propinsi juga telah ada yang dikukuhkan di beberapa daerah seperti di Bandung Jawa Barat, di Balikpapan Kalimantan Timur, di Medan Sumatera Utara, dan di Banda Aceh Nangroe Aceh Darussalam.²²

Khusus untuk Propinsi Sumatera Utara, bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, tercatat 2 (dua) Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:

1. LAZ Al-Hijrah Sumatera Utara, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 451.12/194/K/2002, tanggal 10 Januari 2002.
2. LAZ Peduli Ummat Waspada, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 451.12/4705/K/ 2002, tanggal 28 Juni 2002.²³

Dengan berdasarkan data terpapar di atas, maka diketahui bahwa LAZ di Propinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Kota Medan baru ada dua, yaitu LAZ Al-Hijrah Sumatera Utara

²² *Ibid.*, halaman 16 – 17.

²³ Pengambilan data disertai dengan sedikit wawancara dengan pegawai/staf Seksi Zakat Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara dilakukan pada hari Selasa 11 Juli 2006. Data Terlampir.

dan LAZ Peduli Ummat Waspada. Hal ini menunjukkan bahwa panitia-panitia amil zakat di Kota Medan ini khususnya selain daripada kedua LAZ tersebut di atas adalah tidak legal menurut hukum. Dikatakan tidak legal, sebab panitia-panitia/amil-amil zakat tersebut tidak terlegalisasi, tidak dikukuhkan oleh pemerintah, dan belum menyesuaikan diri dengan kehendak undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU Nomor 38 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Agama RI. No. 373 Tahun 2003 seperti dikemukakan di atas. Keberadaan LAZ yang hanya dua saja di Propinsi Sumatera Utara ini kemudian menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu mengapa cuma hanya dua saja? Bagaimana dengan panitia-panitia zakat masyarakat di desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang beralamat di masjid-masjid tersebut, mengapa tidak dijadikan LAZ dalam rangka mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap kehendak peraturan perundang-undangan? Penelusuran akan jawabannya merupakan pembahasan berikutnya.

C. Panitia Amil Zakat Di Kota Medan Kaitannya Dengan Persyaratan Pembentukan Satu Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Propinsi Sumatera Utara termasuk di dalamnya Kota Medan sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Utara hanya ada dua

yaitu; LAZ Al-Hijrah dan LAZ Peduli Ummat Waspada sesuai penelusuran yang peneliti lakukan dan kemudian mendapatkan datanya dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara. Maka selanjutnya kegiatan pencarian data diarahkan dan dilakukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Mengapa ke Kantor Urusan Agama ? Sebab di sini (di Kantor Urusan Agama) diduga kuat dan diharapkan ditemukan data berupa informasi tentang: 1. jumlah dana zakat yang dihimpun oleh panitia-panitia zakat di masjid-masjid dari setiap kelurahan sebagai laporan. Alamat ini dituju berdasarkan informasi dari beberapa orang P3N tahun-tahun sebelumnya yang mengatakan bahwa mereka diminta dan ditugasi oleh KUA untuk mencari informasi, mencatat, dan melaporkan keadaan kegiatan pengelolaan zakat fitrah berupa; jumlah muzakki, jumlah zakat fitrah baik yang berupa uang maupun berupa beras, dan jumlah zakat mal. 2. Surat Keputusan (SK) yang berupa surat pengangkatan panitia-panitia zakat di masjid-masjid itu kaitannya dengan KUA. Yaitu apakah ada yang di SK-kan atau di sahkan oleh KUA setempat. 3. Pandangan dari para pejabat dan aparat/staf KUA sendiri mengenai legalisasi panitia-panitia zakat yang ada di masyarakat, khususnya di masjid-masjid. 4. keberadaan dari Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan beserta dengan Unit Pengumpul Zakatnya (UPZ).

Berkenaan dengan jumlah dana zakat yang terhimpun oleh panitia-panitia zakat tersebut, dimaksudkan dan dipergunakan untuk memperbandingkannya dengan jumlah dana zakat yang harus terhimpun oleh satu Lembaga Amil Zakat atau oleh satu panitia zakat dalam satu tahun, yang ditetapkan dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu syarat untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah sebagai satu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebab sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa peraturan perundang-undangan menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Propinsi. Salah satu dari persyaratan tersebut berkenaan dengan penghimpunan dana sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003, yaitu bahwa lembaga amil zakat atau panitia zakat yang akan dikukuhkan tersebut harus mampu dan terbukti telah menghimpun dana zakat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam setiap satu tahun.

1. Mengenai Surat Keputusan tentang panitia-panitia/amil-amil zakat, atau dengan kata lain tentang kepanitiaan/amil zakat yang di SK-kan atau disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), bahwa data ini tujuannya untuk mendapatkan gambaran mengenai ada atau tidaknya serta sejauh mana upaya masyarakat melakukan proses legalisasi panitia amil zakat mereka. Sedang pandangan dari pejabat dan aparat/staf KUA mengenai legalisasi panitia-

panitia/amil zakat di masyarakat dimaksudkan adalah untuk mengetahui apakah berpengaruh atau ada mempengaruhi terhadap proses legalisasi panitia-panitia/amil zakat masyarakat untuk dikukuhkan oleh pemerintah sebagai lembaga amil zakat. Adapun data mengenai Badan Amil Zakat (BAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimaksudkan lebih kepada solusi bagi pemecahan masalah yang dihadapi berkenaan dengan proses legalisasi lembaga amil zakat atau panitia-panitia zakat dalam rangka penyesuaian terhadap kehendak peraturan perundang-undangan.

Untuk sistematisnya pemaparan data dan analisisnya, maka data-data yang terhimpun dalam pemaparan, pembahasan dan analisisnya dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Pertama; data yang bersumber dari instansi Departemen Agama. Kedua; data yang bersumber dari masyarakat khususnya Badan Kenaziran Mesjid (BKM).

1. Perolehan Zakat Oleh Panitia/Amil Zakat Berdasarkan Catatan/Laporan Yang Ada Pada Instansi Departemen Agama

Adapun data-data tentang dana zakat yang terhimpun di masyarakat melalui panitia-panitia/amil zakat dan menjadi perolehan atau penerimaan zakat mereka menurut data yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama (KUA-KUA) kecamatan-

kecamatan di Kota Medan pada tahun 2005 yang lalu adalah sebagai berikut:

a. Wilayah KUA Kecamatan Medan Tembung:²⁴

No.	Jumlah Kelurahan/ Kelurahan Tertinggi Dalam Perolehan	Jumlah Beras	Jumlah Uang
1.	6	18.782 kg.	Rp. 99.192.000,-
2.	-	-	-

b. Wilayah KUA Kecamatan Medan Area:²⁵

No.	Jumlah Kelurahan/ Kelurahan Tertinggi Dalam Perolehan	Jumlah Beras	Jumlah Uang
1.	12	51.998,9 kg.	Rp. 158.589.000,-
2.	Kelurahan Komat. I	10.354,5 kg.	Rp. 37.152.000,-

²⁴ Observasi dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006

²⁵ Observasi dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006

c. Wilayah KUA Kecamatan Medan Perjuangan.²⁶

No.	Jumlah Kelurahan/ Kelurahan Tertinggi Dalam Perolehan	Jumlah Beras	Jumlah Uang
1.	9	43.606,2 kg.	Rp. 53.880.000,-
2.	Kelurahan Sei Kera Hilir	8.259 kg.	Rp. 16.600.000,-

f. Wilayah KUA Kecamatan Medan Amplas.²⁷d. Wilayah KUA Kecamatan Medan Denai.²⁷

No.	Jumlah Kelurahan/ Kelurahan Tertinggi Dalam Perolehan	Jumlah Beras	Jumlah Uang
1.	6	72.761,4 kg.	Rp. 300.429.350,-
2.	Kelurahan Binjai	29.940,3 kg.	Rp. 89.820.900,-

²⁶ Observasi dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2006.

²⁷ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2006. Catatan, bahwa data tersebut di atas adalah data tahun 2003 M./ 1424 H. Sedang data tahun 2005 M./ 1426 H. tidak dibuat laporannya sebab tidak ada laporan dari P3N, kecuali hanya laporan dari satu Kelurahan saja, yaitu Kelurahan T. Sari Mandala III, dengan penerimaan/perolehan: beras sebanyak 29.872 kg. Dan uang sebesar Rp. 52.675.000,-.

e. Wilayah KUA Kecamatan Medan Maimun²⁸

No.	Jumlah Kelurahan/ Kelurahan Tertinggi Dalam Perolehan	Jumlah Beras	Jumlah Uang
1.	5	-	Rp. 3.592.000,-
2.	Catatan: Data di yaitu amil BKM	atas hanya Tarbiyatul	dari satu BKM Islamiyah

f. Wilayah KUA Kecamatan Medan Amplas.²⁹

No.	Jumlah Kelurahan/ Kelurahan Tertinggi Dalam Perolehan	Jumlah Beras	Jumlah Uang
1.	7	586.409,3 kg	Rp.194.475.242,-
2.	Kelurahan Harjo Sari I	5.615 kg	Rp. 91.211.642,-

²⁸ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2006. Menurut keterangan pegawai/staf KUA ini, dan diperkuat oleh salah seorang P3N-nya bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini tidak ada lagi Masjid-Masjid yang bersedia memberikan laporannya kecuali Masjid yang satu tersebut di atas.

²⁹ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2006.

c. Wilayah KUA Kecamatan Medan Perjuangan²⁶

No.	Jumlah Kelurahan/ Kelurahan Tertinggi Dalam Perolehan	Jumlah Beras	Jumlah Uang
1.	9	43.606,3 kg	Rp. 23.880.000,-
2.	Kelurahan Sei Kera Hilir	8.250 kg	Rp. 16.600.000,-

d. Wilayah KUA Kecamatan Medan Denai.²⁷

No.	Jumlah Kelurahan/ Kelurahan Tertinggi Dalam Perolehan	Jumlah Beras	Jumlah Uang
1.	6	72.761,4 kg	Rp. 300.429.320,-
2.	Kelurahan Binjai	29.940,3 kg	Rp. 89.850.900,-

²⁶ Observasi dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2006.

²⁷ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2006.

²⁸ Catatan bahwa data tersebut di atas adalah data tahun 2003 M.Y. 1424 H.

Sebagai data tahun 2005 M.Y. 1426 H. tidak dapat diperoleh karena tidak ada laporan dari P3N Kecamatan Harjo yang bersedia memberikan laporannya kecuali Masjid yang satu tersebut di atas.

Kelurahan T. Sani Mubandah III, dengan perolehan beras sebanyak 29.872 kg dan uang sebesar Rp. 52.072.000,-.

29.872 kg dan uang sebesar Rp. 52.072.000,-.

Mengenai data-data di atas, sebenarnya peneliti menelusuri dan mencari data tentang perolehan panitia-panitia zakat atau amil-amil zakat di masyarakat tersebut kepada sebelas (11) Kantor Urusan Agama (KUA) dari sebanyak dua puluh satu (21) Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Medan. Kesebelas KUA Kecamatan dimaksud adalah selain enam (6) KUA tersebut di atas ditambah lima lagi, yaitu: KUA Kecamatan Medan Kota,³⁰ KUA Kecamatan Medan Polonia,³¹ KUA Kecamatan Medan Selayang,³² KUA Kecamatan Medan Johor,³³ dan KUA Kecamatan Medan Timur.³⁴ Pada KUA kecamatan-kecamatan tersebut ini, bahwa pada tiga KUA di antaranya memberi informasi bahwa data perolehan panitia-panitia zakat atau amil-amil zakat di masyarakat (di masjid-masjid) di setiap kelurahan, pada beberapa tahun belakangan ini sudah tidak dibuat lagi laporannya, dan para P3N tidak ada lagi yang melaporkan data zakat fitrah itu dari wilayah

³⁰ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juli tahun 2006.

³¹ Observasi dan wawancara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus tahun 2006.

³² Observasi dan wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus tahun 2006.

³³ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus tahun 2006.

³⁴ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus dan hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2006. Pada KUA ini, observasi dilakukan dua kali, sebab hari pertama gagal bertemu dengan aparatnya, sehingga dilanjutkan dengan hari kedua tersebut.

e. Wilayah KUA Kecamatan Medan Minimum³⁵

No.	Jumlah Kelurahan/ Kecamatan/ Terdiri dari	Jumlah Kelurahan/ Terdiri dari	Jumlah Uang
1.	2	-	Rp. 3.392.000,-
2.	Catatan: Data di atas hanya	atas hanya	dari satu BKM
	Yaitu amil BKM	Terdapat	Islamiyah

f. Wilayah KUA Kecamatan Medan Ampas³⁶

No.	Jumlah Kelurahan/ Kecamatan/ Terdiri dari	Jumlah Kelurahan/ Terdiri dari	Jumlah Uang
1.	7	288.409,3 kg	Rp. 194.472.342,-
2.	Kelurahan Harjo	2.612 kg	Rp. 91.211.642,-
	Sari 1		

³⁵ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Juli tahun 2006. Menurut keterangan pegawai KUA ini, dan diinformasikan bahwa seorang P3N yang berada dalam beberapa tahun belakangan ini tidak ada lagi Masjid-Masjid yang bersedia memberikan laporannya kepada Masjid yang bersangkutan di atas.

³⁶ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2006.

masing-masing. Kemudian, pada satu KUA di antaranya tidak ada pertinggal data tersebut setelah diserahkan ke Kantor Departemen Agama Kota Medan sebagai laporan. Sedang pada satu KUA lagi, bahwa setelah dua kali peneliti ke sana, sampai dengan jam 10.00 para pegawainya belum sampai di tempat kecuali pada hari kedua, salah seorang P3N-nya hadir pada jam 09.00 WIB, dan kepadanya kami melakukan wawancara. Menurutnya, laporan tentang data perolehan zakat dari kelurahan-kelurahan satu kecamatan ini ada, namun pegawai yang membidangi administrasinya belum masuk.

Mengapa data yang dicari dan diambil hanya dari sebelas KUA ? Pada awalnya peneliti sebenarnya bermaksud untuk melacak, mengobservasi dan mewawancarai aparat dari semua KUA yang berjumlah dua puluh satu tersebut, namun ditengah-tengah proses pelacakan dan pencarian data ke dan di KUA-KUA Kota Medan tersebut, terutama setelah KUA yang kedelapan, kesembilan dan kesepuluh, rencana itu kemudian berubah. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh; *pertama* bahwa enam KUA dari sepuluh KUA yang diobservasi memberi informasi bahwa data perolehan zakat masyarakat itu dibuat laporannya oleh KUA pada setiap tahunnya dan diserahkan ke Kantor Departemen Agama Kota. Dengan demikian tentu terpahami dan sekaligus dapat disimpulkan bahwa data perolehan zakat panitia-panitia zakat atau amil-amil zakat masyarakat dari setiap kecamatan di Kota Medan ada laporannya di Kantor Departemen Agama Kota Medan.

Kedua, bahwa berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan pada tiga KUA terakhir khususnya dari sepuluh KUA yang diobservasi tadi, yaitu bahwa beberapa tahun belakangan ini mereka sudah tidak membuat laporan dimaksud lagi, maka bisa jadi KUA-KUA lainnya memiliki problema yang sama. Oleh karena itu, agar pekerjaan dalam mencari informasi data yang dibutuhkan lebih efisien waktu, tenaga, dan biaya, maka dihubungkanlah problema ini dengan sebab pertama yang dikemukakan di atas, yaitu bahwa data yang diperlukan ada di Kantor Departemen Agama Kota Medan sebagai laporan dari KUA-KUA kecamatan, sehingga bisa dan bahkan lebih mudah untuk di lacak ke sana. Atas dasar itu, peneliti mengarahkan pencarian informasi data perolehan zakat panitia atau amil zakat masyarakat tersebut ke Kantor Departemen Agama Kota Medan.

Di Kantor Departemen Agama Kota Medan, peneliti memperoleh data penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah Kota Medan tahun 2005 M/ 1426 H. dari 21 kecamatan Kota Medan,³⁵ sebagaimana yang menjadi harapan dalam dugaan dan kesimpulan sebelumnya. Setelah membaca dan menelaah data dimaksud, peneliti mendapatkan data penting yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa untuk mengambil kesimpulan nantinya. Pertama; bahwa ternyata dari 21 (dua puluh satu) KUA di Kota Medan dana

³⁵ Observasi dilakukan pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus tahun 2006. Dan Photo Copy data dimaksud, dapat dilihat dalam lampiran.

zakat yang terhimpun untuk jumlah uang saja ada yang mencapai Rp. 552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk satu tahun 2005 M/ 1426 H.. Hal itu memiliki arti bahwa telah terlampaui persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pengukuhan satu lembaga amil zakat oleh pemerintah yang menetapkan penghimpunan dana zakat pertahun sebesar Rp. 500.000.000,- saja. Ditambah lagi dengan perolehan zakat berupa beras sebanyak 59.432,4 kg. Jika beras ini diuangkan dengan harga standard rata-rata yaitu Rp. 4.000,- per kilo gram, maka $59.432,4 \times \text{Rp } 4.000,-$ berjumlah sebesar Rp. 237.729.600,-. Jumlah penerimaan atau perolehan zakat dimaksud terdapat di Kecamatan Medan Timur. Maka total pendapatan atau penerimaan zakat Kecamatan Medan Timur itu adalah Rp. 552.000.000,- + Rp. 237.729.600,- sama dengan berjumlah Rp. 789.729.600,-. Atas dasar itu pula peneliti kemudian melakukan observasi ke KUA Kecamatan Medan Timur dalam rangka konfirmasi, sehingga sumber data dari KUA menjadi sebelas (11) KUA.

Oleh karena data yang ada dalam laporan penerimaan zakat Kantor Departemen Agama Kota Medan tersebut di atas hanya ada satu daerah yang perolehan zakatnya melampaui jumlah persyaratan untuk dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat oleh pemerintah, yaitu Kecamatan Medan Timur dengan penerimaan seperti tersebut di atas, maka pelacakan data untuk instansi

Departemen Agama sudah dianggap memadai dengan melakukan observasi ke KUA Kecamatan Medan Timur. Dengan observasi ini, maka sumber data dari KUA berjumlah menjadi sebelas. Perlu kami jelaskan bahwa angka sebelas sebenarnya bukan menjadi tujuan, melainkan hanya sekedar faktor kebetulan. Dimana yang merupakan acuan dan tujuan dalam pencarian data ini adalah tercapainya titik jenuh data. Pada sumber data KUA yang kesebelas ini, kami menganggap data yang diperlukan yang bersumber dari instansi Departemen Agama dalam hal ini KUA telah sampai pada titik jenuh, artinya tidak akan ada yang bertambah dan berkembang lagi.

Kemudian, jika secara sepiantas perolehan zakat tertinggi terlihat berada di wilayah Kecamatan Medan Timur seperti tersebut di atas, namun jika penerimaan zakat kecamatan di Kota Medan ditotal antara jumlah penerimaan yang berupa beras dengan yang berupa uang, maka perolehan tertinggi berdasarkan catatan laporan yang ada di Kantor Departemen Agama Kota Medan itu sebenarnya dicapai oleh Kecamatan Medan Denai, yaitu beras yang berjumlah 727.635 kg, dan uang berjumlah Rp. 228.431.750,-. Jika beras tersebut diuangkan dengan harga yang terendah saja yaitu Rp. 3.500,-, maka akan bernilai sebesar 727.635 kg. X Rp. 3.500,- = Rp. 2.546.722.500,-. Jika zakat yang berupa uang sebesar Rp 228.431.750 ditambahkan dengan jumlah uang yang berupa harga beras zakat sebesar Rp. 2.546.722.500,-,

maka total penerimaan atau perolehan zakat panitia atau amil zakat di wilayah KUA Kecamatan Medan Denai adalah berjumlah sebesar Rp. 2.775.154.250. 2005 yang lalu, sementara menurut

Kedua; bahwa ternyata kedua puluh satu KUA kecamatan di Kota Medan ini menurut data laporan penerimaan zakat fitrah Kantor Departemen Agama Kota Medan tersebut di atas memiliki data, atau ada laporan data perolehan zakatnya setiap tahun, atau paling tidak untuk tahun 2005 M./ 1426 H. Sementara dalam observasi sebelumnya kepada beberapa KUA, ada dua KUA yang menyatakan tidak lagi membuat dan menyusun laporannya. Hal ini sebenarnya tentu mengundang dan menimbulkan tanda tanya, mengapa bisa terjadi dan muncul perbedaan tersebut ?

Dari analisa data yang dikemukakan di atas, ada dua hal yang cukup menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Pertama; bahwa data laporan perolehan zakat oleh panitia/amil zakat masyarakat Kota Medan yang ada di instansi Departemen Agama terasa cenderung ke arah rekayasa, artinya tidak seperti yang sesungguhnya ada di lapangan. Beberapa argumen dapat dikemukakan: 1. bahwa dari sebelas (11) KUA yang diobservasi, tiga diantaranya secara jelas menyatakan tidak ada mengirimkan laporan tentang perolehan zakat untuk tahun 2005 ke Kantor Departemen Agama, sementara pada catatan/laporan Kantor Departemen Agama Kota Medan keseluruhan dari 21 KUA secara lengkap ada catatan/laporannya. 2. bahwa secara khusus untuk

wilayah KUA Kecamatan Medan denai, yang pada penjelasan data di atas disebut atau disimpulkan sebagai peringkat tertinggi dalam perolehan zakat tahun 2005 yang lalu, sementara menurut informasi dari KUA ini laporan terakhir mereka adalah pada tahun 2003 yang jumlahnya hampir mirip. Pada jumlah muzakki sama, pada jumlah penerimaan berupa beras dalam catatan KUA 72.761,4 kg, dalam catatan Kandepag Kota Medan 727.635 kg., dan pada jumlah penerimaan berupa uang dalam catatan KUA Rp. 300.429.350,- dalam catatan Kandepag Kota Medan Rp. 228.431.750,-. Untuk tahun 2005, sebenarnya KUA ini tidak membuat laporan, sebab laporan P3N yang masuk hanya dari satu kelurahan saja yaitu dari Kelurahan T. Sari Mandala III dengan perincian: beras sebanyak 29.872 kg dan uang sebesar Rp. 52.675.000,-. 3. Jika dihitung jumlah muzakkinya yaitu 26.949 dikalikan dengan 2,7 kg zakat berupa beras, maka jumlahnya adalah 72.762,3 kg. Angka ini menunjukkan bahwa semua muzakki berzakat dengan beras, tidak ada yang berzakat dengan uang. Sementara dalam catatan laporan jumlah zakat yang berupa uang jutaan rupiah. 4. hal diatas diperkuat dengan beberapa orang aparat dari beberapa KUA yang membuat laporan, bahwa laporan tersebut sebenarnya penuh dengan rekayasa. Oleh karena itu, dan untuk rekrutmen data yang lebih sah, peneliti kemudian mengarahkan pencarian data ke Badan Kenaziran Masjid-Badan Kenaziran Masjid dengan panitia/amil zakatnya.

Kedua; bahwa data laporan penerimaan zakat Kantor Departemen Agama Kota Medan tersebut adalah untuk satu kecamatan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kelurahan. Juga data catatan/laporan perolehan zakat yang dimiliki oleh KUA tersebut adalah untuk satu kelurahan yang di dalamnya terdiri dari beberapa masjid dengan masing-masing panitia/amil zakatnya secara berdiri sendiri-sendiri. Jika seandainya jumlah perolehan zakat tersebut miliaran rupiah untuk satu kecamatan, dan ratusan juta untuk satu kelurahan, tapi bersumber dari belasan bahkan puluhan panitia/amil zakat masyarakat, tentu jika dibagi jumlah yang miliaran rupiah atau ratusan juta rupiah tersebut dengan masing-masing paniti-panitia/amil zakat yang merupakan sumbernya, dapat disimpulkan akan menjadi hanya puluhan juta rupiah sebagai angka perolehan tertinggi untuk satu panitia/amil zakat.

Jika perolehan atau penghimpunan dana zakat oleh satu panitia/amil zakat hanya berjumlah puluhan juta rupiah, atau jika ada ratusan juta rupiah tapi tidak mencapai lima ratus juta rupiah, berkonsekuensi kepada tidak bisa terkukuhkannya panitia zakat tersebut untuk menjadi satu lembaga amil zakat yang legal. Sebab salah satu syarat bagi satu panitia/amil zakat untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah untuk menjadi satu lembaga amil zakat, adalah harus telah mampu dengan bukti yang jelas menghimpun dana zakat minimal lima ratus juta rupiah setiap

dalam satu tahun. Dengan demikian, berdasarkan data penerimaan atau perolehan dan penghimpunan dana zakat oleh panitia-panitia/amil zakat yang ada di Kota Medan, disimpulkan belum ada satupun diantaranya yang memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan untuk dikukuhkan oleh pemerintah menjadi satu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa data yang merupakan laporan KUA tersebut adalah paling rendah pada tingkat perkelurahan, artinya pada setiap satu kelurahan, tidak pada satu atau setiap panitia/amil zakat secara sendiri-sendiri. Sementara pada setiap kelurahan terdapat belasan bahkan puluhan mushalla dan masjid dimana masing-masing mushalla dan masjid tersebut memiliki panitia/amil zakat yang berdiri sendiri-sendiri. Maka terasa agak kurang jelas bagi kita informasinya tentang berapa jumlah pencapaian penerimaan atau perolehan dana zakat pertahunnya pada masing-masing kepanitiaan/amil zakat Badan Kenaziran-Badan Kenaziran Masjid (BKM-BKM) di Kota Medan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran ke masjid-masjid yang memiliki panitia/amil zakat yang menghimpun dan menerima zakat masyarakat setiap tahunnya itu. Atas dasar itu, dan untuk selanjutnya peneliti kemudian menelusuri beberapa masjid yang diharapkan bisa memberi informasi yang dibutuhkan, yang pembahasannya dalam kajian berikut.

dalam satu tahun. Dengan demikian, berdasarkan data penelitian atau perolehan dan penghimpunan dana zakat oleh panitia/amil zakat yang ada di Kota Medan, disimpulkan belum ada satu pun diantaranya yang memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan untuk dikukuhkan oleh pemerintah menjadi satu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa data yang merupakan laporan KUA tersebut adalah paling rendah pada tingkat pemerintahan, artinya pada setiap satu kelurahan, tidak pada satu atau setiap panitia/amil zakat secara sendiri-sendiri. Sementara pada setiap kelurahan terdapat belasan bahkan puluhan mushalla dan masjid dimana masing-masing mushalla dan masjid tersebut memiliki panitia/amil zakat yang berdiri sendiri-sendiri. Maka terasa agak kurang jelas bagi kita informasinya tentang berapa jumlah pencapaian penerimaan atau perolehan dana zakat pertahunnya pada masing-masing kecamatan/amil zakat Badan Kenaziran-Badan Kenaziran Masjid (BKM-BKM) di Kota Medan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penelitian ke masjid-masjid yang memiliki panitia/amil zakat yang menghimpun dan menerima zakat masyarakat setiap tahunnya itu. Atas dasar itu, dan untuk selanjutnya peneliti kemudian menelusuri beberapa masjid yang diharapkan bisa memberi informasi yang dibutuhkan yang pembahasannya dalam kajian berikut.

2. Perolehan Zakat Oleh Panitia/Amil Zakat Berdasarkan Catatan/Laporan Yang Ada Pada Badan Kenaziran Masjid Berkenaan dengan masjid-masjid bersama panitia/amil zakatnya di Kota Medan ini yang dijadikan sebagai sumber informasi data perolehan zakat oleh panitia/amil zakat, dalam rangka upaya mencapai hasil yang akurat atau data sah, dipilih beberapa masjid yang diduga kuat termasuk dan berada pada kelompok penghimpun dana zakat tertinggi untuk Kota Medan. Cirinya antara lain; masjidnya besar dan luas, megah, dan terkenal, yang kesemuanya ini menjadi pendukung bagi banyaknya jamaah dan muzakkinya. Kemudian ditambah dengan informasi beberapa orang ustadz yang memiliki hubungan dengan BKM-nya dalam rangka kegiatan keagamaan masjid tersebut, serta punya pengetahuan dan memiliki informasi tentang pengelolaan zakat oleh panitia/amil di masjid tersebut.

Adapun masjid-masjid yang menjadi pilihan untuk dijadikan sebagai sumber data dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Masjid Baiturrahman³⁶

Masjid ini berlokasi di Perumahan Johor Indah Permai, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Menurut catatan

³⁶ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2006. Informan adalah Ketua BKM-nya dan petugas/penjaga Masjid Baiturrahman itu sendiri.

panitia/amil zakat Masjid Baturrahman ini, bahwa pada tahun 2005 M. / 1426 H. panitia/amil zakat menghimpun dan mendistribusikan zakat masyarakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal sebanyak:

- 1). Zakat fitrah, yang terdiri dari;
 - a). berupa beras sebanyak: 178,6 kg.
 - b). berupa uang sebesar: Rp. 24.444.700,-.
 - 2). Zakat maal (harta) sebesar Rp. 8.304.000,-.
- Jika zakat yang berupa beras tersebut dinilai dengan uang dengan menggunakan harga beras ukuran yang sedang, yaitu Rp. 4.000,- yang berarti $178,6 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.000,-$ sama dengan Rp. 714.400,-, maka diketahuilah dan didapatkanlah gambaran bahwa total dari jumlah penerimaan atau perolehan zakat oleh panitia/amil zakat Masjid Baiturrahman tersebut pada bulan Ramadhan periode tahun 2005 M./ 1426 H. adalah berjumlah sebesar Rp. 714.400,- + Rp. 24.444.700,- + Rp. 8.304.000,- sama dengan Rp. 33.463.100,- (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).

b. Masjid Al Jihad³⁷

Masjid Al Jihad ini berlokasi di jalan Abdullah Lubis, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Berdasarkan catatan

³⁷ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Kamis dan Jum'at, tanggal 24 dan 25 Agustus 2006. Informan adalah Ketua dan anggota/Sekretaris II Panitia/Amil zakat Masjid Al Jihad.

administrasi rekapitulasi penerimaan zakat panitia/amil zakat Mesjid Al Jihad, bahwa pada tahun 2005 M./ 1426 H. panitia/amil zakat menghimpun zakat masyarakat baik ia zakat fitrah, maupun zakat mal (harta) sebanyak seperti berikut:

1). Zakat fitrah, yang terdiri dari;

- a). berupa beras: 165,9 kg,
- b). berupa uang: Rp. 25.534.930,-.

2). Zakat mal (harta) sebesar Rp. 55.494.000,-.

Jika zakat yang berupa beras dinilai dengan uang dengan menggunakan harga beras ukuran sedang yaitu Rp. 4.000,- maka nilai uang dari beras zakat tersebut adalah $165,9 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.000,-$ sama dengan Rp. 663.600,-. Dengan demikian, jumlah perolehan zakat masyarakat oleh panitia/amil zakat Mesjid Al Jihad pada tahun 2005 adalah bernilai sebesar Rp. 663.600,- + Rp. 25.534.930,- + Rp. 55.494.000,- sama dengan Rp. 81.692.530,-. (delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Selain perolehan dari zakat masyarakat, panitia/amil zakat juga memperoleh dana yang masih ada kaitan dan keberhubungannya dengan zakat, yaitu fidyah dan sadaqah. Dana dari dua wadah ini kiranya bisa dikatakan cukup besar juga. Yaitu dengan uraian data sebagai berikut:

1). Fidyah, yang terdiri dari:

- a). berupa beras: 41,3 kg,

b). berupa uang sebesar Rp. 7.743.000,-.

2). Sadaqah, yang terdiri dari:

a). berupa beras: 22,8 kg,

b). berupa uang sebesar Rp. 10.719.970,-.

Seperti halnya pada zakat, bahwa jika fidyah dan sadaqah yang berupa beras tersebut kemudian ditukar nilai dengan uang, yaitu dengan menggunakan harga beras dalam ukuran yang sedang, yaitu Rp. 4.000,-, maka fidyah dalam bentuk beras dengan jumlah $41,3 \text{ kg} + 22,8 \text{ kg}$ beras yang merupakan sadaqah = $64,1 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.000,-$ akan bernilai sama dengan Rp. 256.400,-. Jadi, perolehan panitia/amil zakat dari sumber fidyah dan sadaqah pada bulan Ramadhan periode tahun 2005 M./ 1426 H. yang lalu adalah berjumlah sebesar Rp. 256.400,- + Rp. 7.743.000,- + Rp. 10.719.970,- sama dengan sebesar Rp. 18.719.370,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Dari data-data tentang perolehan panitia/amil zakat tersebut di atas, maka diketahui dan didapatkanlah gambaran bahwa total jumlah penerimaan atau perolehan dari panitia/amil zakat mesjid Al Jihad pada bulan Ramadhan periode tahun 2005 M./ 1426 H. adalah sebesar Rp. 81.692.530,- + Rp. 18.719.370,- sama dengan Rp. 100.411.900,- (seratus juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah).

c. Mesjid Raya Aceh Sepakat³⁸

Masjid ini berlokasi di jalan Mengkara, wilayah Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Berkenaan dengan kegiatan penerimaan dan penghimpunan zakat fitrah di masjid ini, bahwa catatan, pembukuan atau rekapitulasinya ada di tangan Badan Kenaziran Masjid. Berdasarkan catatan yang ada pada Badan Kenaziran Masjid (BKM), penerimaan atau perolehan zakat oleh panitia/amil zakat masjid pada bulan ramadhan tahun 2005 M./1426 H. yang lalu adalah sebagai berikut:

1). Zakat fitrah terdiri dari:

- a). berupa uang sebesar Rp. 18.650.000,-
- b). berupa beras sebanyak: 95.kg.

2). Zakat mal sebesar Rp. 8.250.000,-

Jika zakat fitrah yang berupa beras di atas ditukarkan dengan nilai uang, yaitu dengan cara menggunakan nilai tukar harga beras tersebut dengan harga sedang yaitu sebesar Rp. 4.000,- per kilo gram, maka nilai uang dari zakat firah yang berupa beras tersebut adalah $95 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.000,-$ sama dengan sebesar Rp. 380.000,-. Dengan demikian, maka jumlah zakat fitrahnya adalah sebesar $\text{Rp. } 18.650.000,- + \text{Rp. } 380.000,-$ sama dengan Rp. 19.030.000,-.

³⁸ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006. Informan adalah salah seorang panitia/amil zakat masjid Raya Aceh Sepakat.

Kemudian, jika jumlah perolehan dari zakat fitrah yang berjumlah sebesar Rp. 19.030.000,- itu ditambah dengan jumlah perolehan dari zakat mal yang berjumlah sebesar Rp. 8.250.000,- tersebut, maka diketahui dan didapatkanlah gambaran bahwa total penerimaan atau perolehan zakat oleh panitia/amil zakat Masjid Raya Aceh Sepakat Kota Medan pada bulan Ramadhan periode tahun 2005 M. / 1426 adalah sebesar Rp. 19.030.000,- + Rp. 8.250.000,- sama dengan Rp. 27.280.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

d. Masjid Al Musabbihin³⁹

Masjid Al Musabbihin ini berlokasi di Perumahan Taman Setia Budi (Tasbi), Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Berdasarkan catatan/pembukuan yang berupa laporan penerimaan zakat oleh Seksi Bazis berkenaan dengan kegiatan penerimaan dan pengelolaan zakat pada bulan Ramadhan periode tahun 2005 yang lalu, maka rincian pendapatan dan perolehan panitia/amil zakat masjid Al Musabbihin periode tahun 2005 M./1426 H. adalah sebagai berikut:

1). Zakat fitrah terdiri dari:

- a). berupa beras sebanyak: 305,5 kg.

³⁹ Observasi dan wawancara dilakukan pada hari Minggu dan Senin, tanggal 27 dan 28 Agustus 2006. Informan adalah salah seorang dari Kenaziran, dan dari Seksi Bazis.

b). berupa uang sebesar Rp. 34.907.000,-

2). Zakat maal, sebesar Rp. 80.415.500,-

Jika zakat fitrah yang berupa beras tersebut di atas dikonversi dengan uang, yaitu dengan menggunakan ukuran harga beras sedang sebesar Rp. 4.000,- per kilo gram, maka nilai uang beras zakat fitrah itu adalah $305,5 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.000,-$ sama dengan sebesar Rp. 1.222.000,-. Dengan demikian jumlah nilai zakat fitrah di masjid ini adalah sebesar Rp. 34.907.000,- + Rp. 1.222.000,- sama dengan sebesar Rp. 36.129.000,-.

Selain zakat fitrah dan zakat maal, panitia juga menerima dan mendapat perolehan dari fidyah, infaq, shadaqah dan lain-lain. Adapun jumlah penerimaan panitia yang bersumber dari fidyah, infaq, shadaqah, dan lain-lain itu adalah berjumlah seperti berikut:

1). Fidyah, sebesar Rp. 12.769.000,-

2). Infaq, shadaqah, dan lain-lain sebesar Rp. 3.047.000,-.

Dengan demikian, bahwa jika point-point suber penerimaan dan perolehan panitia/amil zakat tersebut di atas dijumlahkan, maka perolehan panitia/amil zakat masjid Al Musabbihin pada periode tahun 2005 M./ 1426 H. yang lalu adalah dengan total jumlah Rp. 36.129.000,- + Rp. 80.415.500,- + Rp. 12.769.000,- + Rp. 3.047.000,- sama dengan sebesar Rp. 132.360.500,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

e. Masjid Raya Al-Mashun Medan⁴⁰

Masjid Al Mashun ini merupakan masjid Kesultanan Deli yang berlokasi di Jalan Sisinga Mangaraja, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Menurut Ketua Badan Kenaziran Masjid (BKM)-nya, bahwa setiap bulan Ramadhan pada setiap tahunnya, di masjid ini oleh BKM membuka pelayanan penerimaan dan penyaluran zakat masyarakat. Panitia pelaksana kegiatan pelayanan untuk penerimaan dan penyaluran zakat tersebut menurut sang ketua tidak diberi nama dan tidak diberi sebutan dengan amil zakat, melainkan dengan sebutan Penyelenggara Penerima dan Penyalur Zakat. Penyelenggara ini dibentuk oleh BKM sediri, dan bekerja sejak lima hari sebelum 1 Syawal sampai dengan 1 Syawal (malam takbiran).

Adapun hasil penerimaan atau perolehan zakat dan lainnya itu pada Ramadhan tahun 1426 H./ 2005 M. yang lalu adalah sebagai berikut:

- 1). Zakat fitrah dan fidyah sebanyak lebih kurang 8 ton (8.000 kg lebih) beras.
- 2). Zakat maal sebesar lebih kurang Rp. 8.000.000,-
- 3). Sedekah/infraq sebesar lebih kurang Rp. 1.800.000,-

Jika beras yang merupakan zakat fitrah dan fidyah di atas dikonversi dengan nilai uang, yaitu dengan cara menentukan

⁴⁰ Wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 September 2006 dengan Ketua BKM Al-Mashun.

nilai harga beras di pasaran dengan ukuran harga sedang yaitu sebesar Rp. 4.000,- per kilo gram, maka nilai uang zakat fitrah dan fidyah itu adalah sebesar 8.000,- kg x Rp. 4.000,- sama dengan sebesar Rp. 32.000.000,-.

Dari data point-point sumber penerimaan panitia penyelenggara penerima dan penyalur zakat tersebut di atas, maka diketahui bahwa total jumlah penerimaan dan penghimpunan atau perolehan dana zakat dan lainnya oleh panitia penyelenggara penerimaan dan penyaluran zakat Badan Kenaziran Masjid (BKM) Masjid Raya Al Mashun Medan dalam jangka satu tahun pada periode tahun 2005 M./ 1426 H. yang lalu adalah sebesar Rp. 32.000.000,- + Rp. 8.000.000,- + Rp. 1.800.000,- sama dengan berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Catatan: Menurut Ketua BKM, bahwa khusus untuk zakat fitrah, panitia penyelenggara penerima dan penyalur zakat hanya menerima zakat fitrah berupa beras. Untuk itu, panitia sebelumnya telah mempersiapkan beras sebanyak delapan (8) ton untuk dijual kepada muzakki yang akan mereka pergunakan sebagai zakat fitrah mereka, sekaligus mempermudah para muzakki dalam menyalurkan zakat fitrah mereka lewat panitia penyelenggara penerima dan penyalur zakat tanpa harus memikul atau meninting berkilo-kilo beras dari rumahnya ke masjid.

Masjid Al Mashun ini merupakan masjid Kesultanan Deli yang berlokasi di Jalan Sisinga Mangrja, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Menurut Ketua Badan Kenaziran Masjid (BKM)-nya, bahwa setiap bulan Ramadhan pada setiap tahunnya di masjid ini oleh BKM membuka pelayanan penerimaan dan penyaluran zakat masyarakat. Panitia pelaksana kegiatan pelayanan untuk penerimaan dan penyaluran zakat tersebut menurut sang ketua tidak diberi nama dan tidak diberi sebutan dengan amil zakat, melainkan dengan sebutan Penyelenggara Penerimaan dan Penyalur Zakat. Penyelenggara ini dibentuk oleh BKM sendiri dan bekerja sejak lima hari sebelum 1 Syawal sampai dengan 1 Syawal (malam takbiran).

Adapun hasil penerimaan atau perolehan zakat dan lainnya ini pada Ramadhan tahun 1426 H./ 2005 M. yang lalu adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat fitrah dan fidyah sebanyak lebih kurang 8 ton (8.000 kg lebih) beras.
- 2) Zakat maal sebesar lebih kurang Rp. 8.000.000,-.
- 3) Sedekah/infaq sebesar lebih kurang Rp. 1.800.000,-.

Jika beras yang merupakan zakat fitrah dan fidyah di atas dikonversi dengan nilai uang, yaitu dengan cara menentukan

f. Masjid Al-Muhajirin⁴¹

Masjid Al-Muhajirin ini berlokasi di Komplek Perumahan Bumi Asri, Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Adapun data tentang penerimaan dan penghimpunan zakat pada tahun 2005 M./ 1426 H. yang lalu di masjid ini, berdasarkan catatan pembukuan Badan Kenaziran Masjid ini adalah sebagai berikut:

- 1). Jumlah muzakki sebanyak 513 jiwa yang terdiri dari 106 KK.
- 2). Zakat fitrah terdiri dari:
 - a). beras sebanyak 98 kg
 - b). uang sebesar Rp. 6.501.250,-
- 3). Zakat mal sebesar Rp. 3.800.000,-
- 4). Infaq dan sadakah sebesar Rp. 2.735.250,-
- 5). Fidyah sebesar Rp. 486.000,-

Dari data di atas, diketahui bahwa jumlah penerimaan atau perolehan panitia amil zakat Masjid Al-Muhajirin dalam satu tahun pada tahun 2005 yang lalu dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 6.501.250,- + Rp. 3.800.000,- + Rp. 2.735.250,- + Rp. 486.000,- sama dengan berjumlah sebesar Rp. 13.522.500,-.

Kemudian, jika zakat fitrah yang berupa beras tersebut dikonversi dengan uang dengan menggunakan ukuran harga beras

⁴¹ Observasi dan wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 September 2006. Informan adalah: Wakil Ketua, Sekretaris, dan Seksi Dakwah BKM Al-Muhajirin.

sedang yaitu Rp. 4.000,- maka nilai uangnya adalah berjumlah 98 kg x Rp. 4.000,- = Rp. 392.000,-. Maka, jika jumlah penerimaan yang berupa uang di atas ditambah dengan nilai uang hasil konversi dari penerimaan yang berupa beras, diketahui bahwa total jumlah penerimaan atau perolehan panitia amil zakat Masjid Al-Muhajirin pada periode tahun 2005 M./ 1426 H. yang lalu adalah sebesar Rp. 13.522.500,- + Rp.392.000,- sama dengan sebesar Rp. 13.914.500,- (tiga belas juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Menurut keterangan dari Wakil Ketua BKM, Sekretaris, dan Seksi Dakwahnya, bahwa penerimaan panitia amil zakat dalam dua tahun belakangan ini menurun, dibanding daripada dua tahun yang lalu. Pada tahun 2003 M./ 1424 H. keadaan penerimaan panitia zakatnya adalah:

- 1). Muzakki terdiri dari 749 jiwa.
- 2). Zakat fitrah terdiri dari:
 - a). beras 199,86 kg x Rp. 4.000,- = Rp. 799.440,-
 - b). uang sebesar Rp. 7.776.750,-
- 3). Zakat mal sebesar Rp. 11.032.900,-
- 4). Infak/sedekah sebesar Rp. 3.762.950,-
- 5). Fidyah sebesar Rp. 2.243.000,-

Jika point-point sumber penerimaan panitia zakat di atas dijumlahkan, maka diketahui bahwa total penerimaan atau perolehan panitia zakat Masjid Al Muhajirin Komplek Perumahan

1. Masjid Al-Muhajirin¹⁾

Masjid Al-Muhajirin ini berlokasi di Komplek Perumahan Bumi Asri, Jalan Astana, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Adapun data tentang penerimaan dan pengumpulan zakat pada tahun 2005 M./ 1426 H. yang lalu di masjid ini, berdasarkan catatan pembukuan Badan Kestaraan Masjid ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah muzakki sebanyak 213 jiwa yang terdiri dari 106 KK
- 2) Zakat fitrah terdiri dari:
 - a). beras sebanyak 98 kg
 - b). uang sebesar Rp. 6.201.250,-
- 3) Zakat mal sebesar Rp. 3.800.000,-
- 4) Infak dan sedekah sebesar Rp. 2.732.250,-
- 5) Fidyah sebesar Rp. 486.000,-

Dari data di atas, diketahui bahwa jumlah penerimaan atau perolehan panitia amil zakat Masjid Al-Muhajirin dalam satu tahun pada tahun 2005 yang lalu dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 6.201.250,- + Rp. 3.800.000,- + Rp. 2.732.250,- + Rp. 486.000,- sama dengan berjumlah sebesar Rp. 13.222.500,-. Kemudian, jika zakat fitrah yang berupa beras tersebut dikonversi dengan uang dengan menggunakan ukuran harga beras

¹⁾ Observasi dan wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 September 2006. Informan adalah Wakil Ketua, Sekretaris, dan Seksi Dakwah BKM Al-Muhajirin.

Bumi Asri Medan dalam satu tahun pada periode tahun 2003 M./ 1424 H. yang lalu adalah sebesar Rp. 799.440,- + Rp. 7.776.750,- + Rp. 11.032.900,- + Rp. 3.762.950,- + Rp. 2.243.000,- sama dengan sebesar Rp. 25.615.040,- (dua puluh lima juta enam ratus lima belas ribu empat puluh rupiah).

g. Masjid Tarbiyah⁴²

Masjid Tarbiyah ini berlokasi di Jalan S.M. Raja Simpang Limun, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Berdasarkan data di Badan Kenaziran Masjid Tarbiyah, bahwa zakat yang diterima seluruhnya adalah zakat fitrah. Dan bentuk zakat fitrah yang diterima dan dikelolapun hanya menerima zakat berupa beras. Adapun jumlah penerimaan atau perolehan panitia zakat pada tahun 2005 yang lalu adalah:

- 1). Zakat fitrah sebanyak 548 fitrah x 2,7 kg = 1.479,6 kg x harga beras dalam ukuran sedang yaitu Rp 4.000,- sama dengan Rp. 5.918.400,-
- 2). Fidyah sebesar Rp. 178.500,-
- 3). Infak sbesar Rp. 206.500,-.

Jika point-point sumber penerimaan di atas kemudian dijumlahkan, maka diketahui bahwa penerimaan atau perolehan panitia zakat Masjid Tarbiyah Simpang Limun Medan ini dalam

⁴² Observasi dan wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 September 2006. Informan adalah Sekretaris BKM Tarbiyah.

satu tahun pada periode tahun 2005 M./ 1426 H. yang lalu adalah sebesar: Rp. 5.918.400,- + Rp. 178.500,- + Rp. 206.500,- sama dengan sebesar Rp. 6.303.400,- (enam juta tiga ratus tiga ribu empat ratus rupiah).

h. Masjid Ikhlahiyyah⁴³

Masjid Ikhlahiyyah ini berlokasi di Jalan Garu I, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Simpang Limun Medan. Adapun hasil penerimaan atau perolehan panitia/amil zakat Masjid Ikhlahiyyah ini dalam satu tahun pada periode tahun 2005 berdasarkan catatan pembukuan panitia adalah sebagai berikut:

1). Zakat fitrah terdiri dari:

- a). beras sebayak 506 kg.
- b). uang sebesar Rp. 12.609.790,-.

2). Zakat mal sebesar Rp. 2.900.000,-

3). Fidyah dan sadakoh sebesar Rp. 2.540.000,-

Adapun jumlah uang yang terhimpun oleh panitia/amil zakat masjid Ikhlahiyyah pada periode tahun 2005 M./ 1426 H. yang lalu seperti tersebut di atas berjumlah sebesar Rp. 12.609.790,- + Rp. 2.900.000,- + Rp. 2.540.000 sama dengan sebesar Rp. 18.049.790,-.

⁴³ Observasi dan wawancara dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 08 September 2006.

Kemudian, jika beras yang berjumlah sebanyak 506 kg tersebut dikonversi dengan uang seharga beras sedang yaitu Rp 4.000,- per kilo gram, maka jumlah nilai uangnya adalah sebesar $506 \times \text{Rp. } 4.000,-$ sama dengan Rp. 2.024.000,-.

Dari uraian di atas, maka diketahui bahwa jumlah penerimaan atau perolehan panitia/amil zakat masjid Ikhlashiyah tersebut dalam satu tahun pada periode tahun 2005 M./ 1426 H. yang lalu adalah sebesar Rp. 18.049.790,- + Rp. 2.024.000,- sama dengan sebesar Rp. 20.073.790,- (dua puluh juta tujuh puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Setelah menelusuri data-data tentang penerimaan atau perolehan panitia/amil zakat dalam satu tahun pada periode tahun 2005 M./ 1426 H. yang lalu pada masjid-masjid pilihan tersebut di atas, peneliti berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa data-data perolehan atau penerimaan panitia/amil zakat pada masjid-masjid lainnya di Kota Medan tidak akan jauh berbeda. Kalaupun ada jumlah penerimaan atau jumlah perolehan oleh panitia/amil zakat di masjid lainnya itu yang lebih tinggi dibanding masjid-masjid pilihan di atas, tentu dan dapat dipastikan paling tinggi selisihnya 100 % atau satu kali lipat (tapi hitungan inipun sebenarnya di luar logika normal, sebab masjid-masjid pilihan tersebut merupakan masjid yang rata-rata muzakkinya banyak, dan banyak di antaranya orang-orang kaya yang diduga kuat berzakat mal). Kemudian, jika dipakai angka selisih satu kali lipatpun sebenarnya

belum ada yang mencapai jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang dituntut oleh peraturan perundang-undangan sebagai salah satu syarat bagi satu panitia/amil zakat untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah sebagai satu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dari data-data tentang penerimaan atau perolehan dana zakat dan lainnya itu oleh panitia/amil zakat masjid-masjid pilihan di Kota Medan tersebut di atas dalam satu tahun pada periode tahun 2005 M./ 1426 H. yang lalu, maka diketahui bahwa penerimaan atau perolehan dana zakat dan lainnya itu yang tertinggi adalah didapatkan oleh panitia/amil zakat Masjid Al Musabbihin dengan total jumlah penerimaan atau perolehan sebesar Rp 132.360.500,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Disusul untuk peringkat kedua oleh panitia/amil zakat Masjid Al Jihad dengan total jumlah penerimaan atau perolehan sebesar Rp. 100.411.900,- (seratus juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah).

Dengan melihat kepada jumlah total penerimaan atau perolehan panitia/amil zakat masjid sebagai peringkat tertinggi di atas, ditambah lagi bahwa seandainya pun ada penerimaan atau perolehan panitia/amil zakat masjid lainnya yang lebih tinggi dengan tingkat perkiraan tertinggi satu kali lipat atau 100 %, maka kesimpulannya tetap sama yaitu bahwa penerimaan atau perolehan panitia/amil zakat masjid-masjid di Kota Medan tidak ada yang

mencapai apalagi melampaui nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Jika tidak ada panitia/amil zakat masjid di Kota Medan ini yang penerimaan atau perolehan panitia/amil zakatnya mencapai nilai Rp 500.000.000,-, maka dapat disimpulkan bahwa tak satupun panitia/amil zakat tersebut yang dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi atau legal. Sebab salah satu syarat untuk dapat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat oleh pemerintah adalah mampu menghimpun dana minimal Rp. 500.000.000,- dalam satu tahun pada setiap tahunnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa panitia/amil zakat di masjid-masjid di Kota Medan ini sampai dengan sekarang tidak ada atau belum ada yang legal.

D. Posisi Panitia/Amil Zakat BKM: Sebagai BAZ Atau LAZ

Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan terdahulu, amil zakat menurut undang-undang Indonesia hanya dua macam yaitu Badan Amil Zakat yang di Kota Medan tentunya merupakan bentukan pemerintah kota yaitu oleh Wali Kota dan pemerintah kecamatan, yaitu oleh Camat. Kemudian Lembaga Amil Zakat di wilayah Propinsi Sumatera Utara hanya ada dua; LAZ Waspada dan LAZ Al-Hijrah. Sementara masyarakat juga membentuk dan mengelola sendiri kepanitiaan/amil zakat khususnya lewat Badan

Kenaziran Masjid disetiap masjid dan mushalla. Oleh karena itu, maka pada judul sub bab ini digunakan istilah panitia/amil zakat, sebab belum jelas apakah ia masuk ke dalam salah satu kategori BAZ atau LAZ sebagai amil yang legal menurut hukum, atau bukan.

Menurut informasi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) – yang dalam hal ini dijadikan sebagai informan – bahwa *pertama*; ada beberapa KUA yang mentauliyahkan (memberi legalisasi/memberi kewenangan) kepada panitia/amil zakat masyarakat yang di bawah naungan BKM tadi. Bentuk pentauiyahan itu, ada yang berupa pengesahan dengan menambalkan format kalimat atau kata “mengetahui” dari KUA terhadap SK panitia/amil zakat yang sudah ada dan telah dibuat oleh BKM. Dan ada juga pengeluaran SK yang formatnya langsung dari KUA setelah disampaikan susunan kepanitiaan bersama nama-namanya ke KUA yang bersangkutan.

Informasi dari Kantor Urusan Agama tersebut di atas, diperkuat oleh beberapa pengurus Badan Kenaziran Masjid (BKM) yang diwawancarai dan diobservasi, yang dalam penelitian ini mereka dijadikan sebagai sumber informasi. Ada di antara kepanitiaan/amil zakat Badan Kenaziran Masjid itu yang langsung di SK-kan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana fakta ditemukan di lapangan, seperti panitia/amil zakat Mesjid Al-Musabbihin Komplek Perumahan Taman Setia

Budi yang di SK-kan dan ditandatangani SK-nya oleh Kepala KUA Kecamatan Medan Sunggal tertanggal 18 Oktober 2005. Dan ada pula di antaranya yang hanya disahkan saja, yaitu SK-nya dibuat dan ditandatangani oleh BKM, kemudian SK tersebut dibubuhi kalimat pensahan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor urusan Agama setempat.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi mengapa tauliyah itu diberikan oleh pemerintah (dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama) adalah dikarenakan atas dua hal. *Pertama* oleh karena adanya permohonan masyarakat, yaitu oleh beberapa panitia/amil zakat. *Kedua*, disebabkan oleh karena ada pula yang melalui anjuran atau atas inisiatif pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Contoh pentauliyahan atau pen-SK-an oleh KUA bagi panitia/amil zakat dengan dasar atas permohonan masyarakat adalah tercatat KUA Medan Perjuangan menurut keterangan staf/pegawainya, KUA Medan Denai berdasarkan keterangan staf/pegawainya, dan KUA Medan Johor menurut informasi dari Ketua BKM Baiturrahman Perumahan Johor Indah Permai Kecamatan Medan Johor. Sedang contoh pentauliyahan atau pen-SK-an oleh KUA bagi panitia/amil zakat atas anjuran atau inisiatif pihak KUA adalah tercatat KUA Medan Baru berdasarkan informasi dari pengurus BKM/ panitia zakat Mesjid Al Jihad, dan KUA Medan Timur berdasarkan informasi dari salah seorang P3N di wilayah Kecamatan Medan Timur tersebut.

Menurut keterangan dari beberapa orang informan dari KUA-KUA tersebut di atas, ada beberapa Badan Kenaziran Masjid (BKM) yang mengajukan permohonan dengan membawa susunan kepanitiaan zakat beserta nama-nama orangnya ke KUA untuk disahkan atau di SK-kan permohonan tersebut biasanya dimasukkan menjelang bulan Ramadhan atau pada bulan Ramadhan itu sendiri. Dan oleh KUA, semua itu disahkan dan/atau di-SK-kan. Para pengurus kepanitiaan zakat tersebut lewat BKM mengupayakan pelegalan kepanitiaan zakat mereka adalah karena keinginan agar kepanitiaan tersebut dapat disebut legal menurut hukum. Harapan dan keinginan sebagai akibat dari pemahaman akan arti pentingnya pelegalan kepanitiaan/amil zakat tersebut oleh pemerintah (dalam hal ini melalui KUA), disebabkan ada yang menganjurkan seperti itu. Salah satu contohnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh pengurus BKM Baiturraman Komplek Perumahan Johor Indah Permai yang setiap tahunnya melegalisasikan kepanitiaan/amil zakatnya ke KUA. Menurut pengurus ini, hal seperti itu dilakukan dikarenakan oleh pemahaman mereka bahwa kepanitiaan tersebut baru menjadi legal setelah disahkan atau ada pentauliyahan dari KUA, terutama setelah adanya penjelasan ustadz yang memberikan bimbingan dan penyuluhan lewat pengajian kepada mereka.

Sementara di beberapa masjid, lewat informasi dari pengurusnya, seperti informasi dan penjelasan yang didapatkan

dari BKM Al-Jihad Medan Baru melalui panitia zakatnya bahwa pihak KUA yang senantiasa dan terus memantau kegiatan masjid terutama kegiatan pengelolaan zakat, menyarankan serta mendorong pihak BKM agar melegalisasikan atau mentauiyahkan kepanitiaan/amil zakatnya ke KUA pada setiap tahunnya. Kemudian, berbeda sedikit dengan proses pelegalan kepanitiaan/amil zakat itu di Kecamatan Medan Timur, bahwa di wilayah ini sebagaimana yang diinformasikan oleh salah seorang P3N-nya bahwa para P3N di sini, terutama 3 orang mereka dari P3N-nya atas restu dan setuju Kepala KUA-nya secara gigih menyampaikan dan memberikan dorongan kepada masyarakat (dalam hal ini kepada BKM-BKM yang membentuk panitia/amil zakat) agar mensahkan, melegalisasikan, atau mentauiyahkan panitia/amil zakat mereka ke KUA. Sebab menurutnya panitia/amil zakat itu adalah yang dipekerjakan bukan pekerja. Dan yang mempekerjakannya adalah pemerintah yang dalam hal dan urusan ini diwenangi oleh KUA.

Atas dasar hal di atas, juga melalui informasi dari beberapa aparat KUA diketahui bahwa KUA-KUA yang tidak ada mentauiyahkan (mensahkan/melegalisasi) panitia-panitia zakat di wilayahnya dikarenakan para panitia/amil zakat di wilayah itu tidak ada yang memohon untuk ditauiyahkan atau di SK-kan. Juga, pihak KUA sendiri tidak menganjurkan, dan tidak mendorong masyarakat pada umumnya, dan panitia/amil zakat

khususnya agar mensahkan, mentauliyahkan, atau melegalisasikan kepanitiaannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Kedua; bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah.⁴⁴ Pemerintah dimaksud adalah: 1. Presiden atas usul menteri untuk BAZ tingkat nasional. 2. Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk BAZ tingkat propinsi. 3. Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama untuk BAZ tingkat Kota atau Kabupaten. 4. Camat atas usul Kepala Kantor urusan Agama untuk BAZ tingkat kecamatan. Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk langsung oleh pemerintah ini hanya ada satu untuk masing-masing tingkatan. Sementara panitia/amil zakat di masyarakat khususnya bentukan dari dan berada di bawah Badan Kenaziran Masjid (BKM), yaitu di Desa dan Kelurahan-Kelurahan atau dilingkungan-lingkungan di Kota Medan ini, tidak ada yang merupakan BAZ yang dibentuk oleh Camat (pemerintah) atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan ini cukup banyak. Oleh karenanya, maka kepanitiaan/amil zakat yang banyak bertebaran di masyarakat khususnya di bawah naungan Badan Kenaziran Masjid itu menurut tinjauan hukum tidaklah berposisi serta tidak dapat diposisikan sebagai Badan Amil Zakat (BAZ).

⁴⁴ Pasal 6 ayat (1) UU. No. 38 Tahun 1999.

Jika memang kepanitiaan-kepanitiaan/amil-amil zakat masyarakat betukan Badan Kenaziran Masjid-Badan Kenaziran Masjid (BKM-BKM) tidak dapat berposisi serta tidak dapat diposisikan sebagai amil zakat dalam kategori BAZ karena tidak dibentuk, dan tidak diangkat oleh pemerintah (Camat atas usul Kepala KUA), maka masih ada kemungkinan dalam tinjauan hukum bahwa panitia/amil zakat masyarakat, yang dibentuk dan dikelola sendiri oleh masyarakat itu tadi bisa berposisi atau diposisikan sebagai BAZ yaitu lewat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satu unsur pengurus juga atau satuan organisasi dalam BAZ yang diangkat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) sendiri.⁴⁵ Namun, informasi yang didapatkan bahwa sampai dengan sekarang, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai bagian dari perangkat atau unsur pelaksana kepengurusan Badan Amil Zakat di semua kecamatan di Kota Medan belum ada. Bahkan Badan Amil Zakat (BAZ)-nya sajumpun ada yang masih belum terbentuk, dan ada yang baru terbentuk setelah terbentuknya BAZ Kota Medan baru-baru ini. Dan bahkan bagi sebahagian pegawai termasuk ada di antaranya Kepala KUA, sebelum Raker pengurus

⁴⁵ Pada pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan: "Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri".

BAZ Kota Medan yang baru terbentuk itu, sama sekali belum pernah mendengar istilah UPZ tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa UPZ tersebut belum ada pada BAZ-BAZ tingkat kecamatan di Kota Medan.⁴⁶ Atas dasar hal itu pula diketahui bahwa panitia/amil zakat masyarakat di Kota Medan ini tidak ada yang dijadikan dan berperan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari salah satu Badan Amil Zakat yang ada.

Dari paparan dan uraian data di atas, diketahui bahwa di antara panitia-panitia/amil-amil zakat masyarakat, khususnya yang berada di bawah naungan dan pembinaan Badan Kenaziran Masjid (BKM) tersebut ada memang yang mengupayakan melegalkan kepanitiaan zakatnya, namun tidak ada yang melalui kategori Badan Amil Zakat (BAZ), sehingga dapat pula disimpulkan bahwa panitia-panitia/amil zakat masyarakat itu di Kota Medan ini tidak ada yang berposisi atau berkedudukan hukum sebagai amil dalam kategori Badan Amil Zakat (BAZ). Upaya pelegalisasian yang ada, adalah lewat pengesahan, pen-SK-an, atau pentauiyahan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun cukup banyak dan memang lebih banyak yang sama sekali tidak melakukan upaya legalisasi. Dengan demikian, bahwa sampai dengan pembahasan ini, yang diketahui dan bisa disimpulkan untuk mengarahkan dan

⁴⁶ Keterangan di atas tersebut yaitu terindikasinya bahwa UPZ itu tidak ada dan belum ada pada baz-BAZ Kecamatan, sesuai dengan keterangan dari beberapa Kepala KUA yang diwawancarai.

memasukkan posisi atau kedudukan hukum kepanitiaan/amil zakat masyarakat itu ke dalam kategori Lembaga Amil Zakat, sebab untuk kategori BAZ sudah tidak ada peluang menurut hukum. Hal ini diketahui disebabkan bahwa pelegalisasian kepanitiaan zakat itu hanya lewat pengesahan, pen-SK-an, atau pentauliyahan dari KUA, tidak ada proses pelegalannya yang melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Berarti dengan melihat dari sisi ini kaitannya dengan sub bab pembahasan, panitia/amil zakat masyarakat itu berkedudukan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) bukan sebagai Badan Amil Zakat (BAZ).

Satu hal di sini sebagai sesuatu temuan di atas tadi yang sebetulnya cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama menjadi suatu kajian tersendiri sebagai lanjutan dari penelitian yang sedang dilakukan ini adalah bahwa masyarakat yang menganggap pentingnya legalisasi kepanitiaan/amil zakat masyarakat, baik mereka yang dari BKM dan panitia/amil zakat itu sendiri, maupun mereka yang dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka berpandangan bahwa kepanitiaan/amil zakat itu memang harus dilegalisasi oleh pemerintah. Dalam pandangan mereka bahwa proses dan prosedur pelegalisasiannya serta pemerintah yang berwenang melegalisasinya adalah lewat dan oleh instansi Kantor Urusan Agama (KUA). KUA dalam melegalisasi kepanitiaan/amil zakat tersebut adalah lewat pentauliahannya, baik dengan cara pengesahan surat keputusan kepanitiaan yang

dibentuk oleh pemerintah,⁴⁷ dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.⁴⁸

Secara khusus berkenaan dengan proses dan prosedur serta instansi yang berwenang dalam hal pengukuhan atau pentauiyahan suatu kepanitiaan/amil zakat untuk dapat menjadi satu amil zakat menurut hukum dalam kategori Lembaga Amil Zakat (LAZ), bahwa ia harus dikukuhkan atau diberi tauliyah oleh pemerintah seperti tersebut di atas. Adapun pemerintah dimaksud sebagai pihak yang berwenang mengukuhkan atau mentauliyahkan atau melegalisasikan satu amil zakat, satu panitia zakat, untuk menjadi satu Lembaga Amil Zakat, adalah Menteri Agama untuk tingkat pusat atau yang wilayahnya nasional, kemudian Gubernur Kepala Daerah untuk tingkat propinsi.⁴⁹

Atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat seperti tersebut di atas, jika ia dipakai sebagai ukuran untuk melihat atau menyelami fakta dari proses dan prosedur serta instansi yang bertindak dalam pengesahan SK panitia/amil zakat, pengukuhan atau pentauiyahan terhadap panitia-panitia/amil-amil zakat di Kota Medan yang sudah

⁴⁷ Pasal 6 ayat (1) UU No. 38 Tahun 1999.

⁴⁸ Pasal 7 ayat (1) UU. No. 38 Tahun 1999.

⁴⁹ Pasal 21 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Undang-Undang NOMOR #* Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

berlangsung selama ini sebagaimana dikemukakan di atas, maka panitia-panitia/amil zakat tersebut menurut hukum tidak bisa dan tidak dapat didudukkan atau diposisikan sebagai amil zakat dalam kategori Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebab instansi pemerintah yang mengukuhkan atau mentauiyahkan mereka adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang bukan pemerintah yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, dan karenanya tidak berwenang dan juga tindakannya tidak mengakibatkan terjadinya hukum yang sah atau legal. Sementara pemerintah yang dimaksud oleh undang-undang sebagai pemerintah yang berwenang untuk mengukuhkan atau mentauiyahkan panitia/amil zakat untuk menjadi satu lembaga amil zakat (khususnya di Kota Medan sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Utara) adalah Gubernur Propinsi Sumatera Utara atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan paparan di atas berkenaan dengan posisi atau kedudukan dari panitia/amil zakat masyarakat di Kota Medan, apakah ia sebagai Badan Amil Zakat (BAZ) atau sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), dapat disimpulkan bahwa kepanitiaan/amil zakat masyarakat yang bernaung di bawah BKM-BKM di Kota Medan ini tidak dapat didudukkan atau diposisikan sebagai amil zakat menurut hukum, baik ke dalam kategori BAZ maupun ke dalam kategori LAZ.

Dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas, berikut dengan analisisnya, maka kiranya kemudian dapat ditarik satu kesimpulan yang lain atau tambahan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat mengenai pengelolaan zakat, nampaknya tidak ada mengatur tentang pelegalisasian kepanitiaan-kepanitiaan/amil-amil zakat masyarakat khususnya yang dibentuk dan diangkat oleh Badan Kenaziran Masjid-Badan Kenaziran Masjid (BKM-BKM). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hanya mengatur Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan bentukan langsung pemerintah, yang berarti dapat juga dikatakan sebagai badan semi pemerintah atau bahkan badan/milik pemerintah. Dan juga hanya mengatur Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dimiliki oleh organisasi-organisasi ke-Islam-an yang besar, dengan anggotanya dan tentunya zakatnya dalam partai yang besar.

E. Solusi Bagi Masalah Pelegalan Panitia/Amil Zakat Masyarakat

Sebagaimana telah terungkap di atas bahwa kepanitiaan-kepanitiaan/amil-amil zakat masyarakat Kota Medan ini, khususnya dan karena biasanya yang berada di bawah naungan Badan Kenaziran Masjid (BKM-BKM), tidak dapat disebut sebagai amil zakat baik dalam kategori Badan Amil Zakat (BAZ) maupun dalam kategori Lembaga Amil Zakat (LAZ), tentu hal ini

menjadi suatu problem hukum dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilihat, dikaji, dan dicari suatu solusi bagi kejelasan kedudukannya, sehingga kesemuanya dapat legal menurut hukum yang berlaku.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, khususnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu berkenaan dengan persyaratan satu lembaga amil zakat atau satu kepanitiaan zakat, khususnya dari sisi dana zakat yang harus mampu dan telah mampu menghimpunnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap tahun minimal dua tahun pada saat permohonan diajukan, maka dengan memperhatikan juga perolehan panitia-panitia/amil-amil zakat bentukan masyarakat yang berada di bawah naungan BKM-BKM Kota Medan tersebut pada setiap tahunnya, khususnya periode tahun 2005, dan dengan memperbandingkan antara keduanya akan tersimpulkan bahwa pelegalisasian kepanitiaan/amil zakat masyarakat yang berada di bawah naungan BKM tersebut untuk dikukuhkan jadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang legal menjadi sesuatu yang tidak memungkinkan.

Juga dengan memperhatikan bahwa menjadikan kepanitiaan/amil zakat masyarakat yang berada dalam naungan Badan Kenaziran Masjid (BKM) tersebut merupakan sesuatu yang

tidak memungkinkan, sebab BAZ kecamatan hanya ada satu untuk satu kecamatan, sementara panitia-panitia/amil zakat itu ada di setiap masjid dan mushalla, yang sudah tentu jumlahnya puluhan dan bahkan ratusan untuk satu kecamatan.

Di sisi lain, bahwa yang terjadi, berlaku dan dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat Kota Medan yaitu oleh sebahagian **kepanitiaan/amil zakat dengan mengupayakan pengesahan atau pen-SK-an dari Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dikemukakan sebelumnya**, hal itu juga tetap tidak menjadikan **kepanitiaan-kepanitiaan/amil-amil zakat itu legal menurut hukum**. Sebab Kantor Urusan Agama bukanlah lembaga pemerintah yang berwenang mengukuhkan satu kepanitiaan/amil zakat menjadi satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang legal atau resmi tercatat menurut hukum. Lembaga pemerintah yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berwenang dan diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengukuhkan satu kepanitiaan/amil zakat yang dibentuk dan dikelola oleh swadaya masyarakat di desa-desa dan kelurahan-kelurahan dalam tingkat propinsi itu menjadi satu Lembaga Amil Zakat menurut peraturan perundang-undangan adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi yang bersangkutan. Dengan demikian pengesahan atau pen-SK-an oleh Kantor urusan Agama atas satu kepanitiaan/amil zakat dalam rangka upaya melegalisasinya agar diakui dan dapat disebut

sebagai amil zakat yang legal, merupakan salah prosedur. Oleh karenanya tetap dikatakan menurut hukum sebagai panitia/amil zakat yang tidak legal, sebab upaya pelegalisasiannya tidak prosedural.

Dengan fakta-fakta dan logika hukum yang dipaparkan di atas, yang kesemuanya mengarah kepada suatu kesimpulan bahwa kepanitian-kepanitiaan/amil-amil zakat masyarakat yang berada di bawah naungan BKM-BKM tersebut tidak dan belum legal, maka dalam pandangan dan kajian hukum sebagai suatu tawaran solusi, bahwa pelegalisasian kepanitian/amil zakat tersebut akan dimungkinkan dengan satu jalan lagi. Artinya jalan yang tidak terlalu besar memerlukan biaya untuk melaluinya.

Adapun jalan yang paling ringan biayanya itu, serta memungkinkan secara hukum untuk dilakukan tersebut adalah dengan menjadikan kepanitian-kepanitiann/amil-amil zakat masyarakat yang berada di masjid-masjid dan mushalla-mushalla dalam naungan BKM-BKM tersebut sebagai Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ-UPZ) dari Badan Amil Zakat kecamatan.

Untuk solusi seperti dikemukakan di atas, memang masih menemukan kendala, yaitu adanya kemungkinan yang sangat besar sekali bahwa hal tersebut tidak dapat diterima (akan ditolak) oleh panitia-panitia/amil-amil zakat masyarakat itu. Sebab Unuit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ) itu menurut undang-undang, wewenangnya hanyalah mengumpulkan saja dan menyerakanya ke

BAZ kecamatan tadi, tidak berwenang membagikan atau mendistribusikannya.⁵⁰ Sementara menurut kebiasaannya panitia-panitia/amil zakat masyarakat itu sendirilah yang menghimpun dan sekaligus mendistribusikannya kepada para mustahik. Juga mereka mengambil upah lelah sebagai bagian amil dari dana zakat itu sendiri. Dan karena kepercayaan itulah sehingga nampaknya mereka mau dan bersemangat kerja mengelola zakat tersebut.

Oleh karenanya, dan atas dasar itu pula bahwa untuk terlaksananya solusi ini, kebijakan dalam pertauran perundang-undangan itu sedikit saja diupayakan dirubah, khususnya bunyi rumusan pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373, dengan menambah kata “dan mendistribusikan” setelah kata: “dengan tugas mengumpulkan”, sehingga format kalimatnya menjadi: “dengan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat”. Kemudian bunyi rumusan pasal 9 ayat (8) Keputusan Dirjen Bimas Islam Dan urusan haji nomor D/291 Tahun 2000, dengan merubah bunyi rumusan kalimat “..., dan hasilnya disetorkan

⁵⁰ Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) itu memiliki tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan secara lebih tegas lagi, bawa pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 pada pasal 9 ayat (8) diatur dan disebutkan; “Unit pengumpul Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat di unit masing-masing, dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat, dan hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat, karena Unit Pengumpul Zakat tidak bertugas mendayagunakan.”

kepada ...dst." dengan kalimat "dan mendistribusikan hasilnya di tempat atau lingkungan mana zakat tersebut diterima dan dihimpun."

Jika tawaran solusi di atas dilakukan, maka problem legalisasi kepanitiaan/amil zakat masyarakat yang berada pada masjid-masjid dan mushalla-mushalla di bawah BKM-BKM tersebut menjadi terselesaikan. Mereka menjadi panitia-panitia/amil-amil zakat yang legal menurut hukum, dan berhak memperoleh bahagian secara sah dari harta zakat yang mereka kelola. Sekaligus peraturan perundang-undangan negara telah dapat dikatakan ada mengatur dan menyahuti kebutuhan dan kepentingan masyarakat/warganya, khususnya di bidang pengelolaan zakat.

Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 451.12/194/K/2002, tanggal 28 Juni 2002. 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Peduli Ummat yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 451.12/194/K/2002, tanggal 28 Juni 2002.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak tahun 1999 dengan keluar dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka amil zakat di Indonesia menurut UU ini hanya ada dua macam, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan bentukan langsung oleh pemerintah dari tingkat nasional hingga ke tingkat kecamatan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan bentukan masyarakat tapi dikukuhkan (ditaulyahkan) oleh pemerintah dalam dua tingkat yaitu tingkat nasional dan tingkat propinsi. Aturan ini melahirkan paradigma baru tentang pengelolaan zakat di Indonesia, artinya bahwa semua lembaga, panitia, atau amil zakat yang ada harus menyesuaikan diri dengan kehendak daripada undang-undang agar secara hukum lembaga, panitia, atau amil zakat tersebut dipandang legal atau sah sebagai amil zakat.

Di propinsi Sumatera Utara secara umum dan di Kota Medan secara khusus, lembaga, panitia, atau amil zakat yang sudah menyesuaikan diri dengan kehendak dari peraturan perundang-undangan tadi baru dua (2) yaitu; 1. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Hijrah Sumatera Utara yang dikukuhkan dengan Surat

Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 451.12/194/K/2002, tanggal 10 Januari 2002. 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Peduli Ummat Waspada, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 451.12/4705/K/2002, tanggal 28 Juni 2002.

Dengan demikian, lembaga, panitia, atau amil zakat lainnya selain dua LAZ tersebut di atas, secara khusus lembaga, panitia, atau amil zakat masyarakat yang berada dibawah Badan Kenaziran-Badan Kenaziran Masjid (BKM-BKM) di Kota Medan ini tidak ada yang legal menurut hukum. Sebab tidak ada di antaranya yang dibentuk dan diangkat oleh pemerintah baik oleh Camat ataupun BAZ-nya, dan oleh Bupati/Wali Kota ataupun BAZ-nya untuk kategori Badan Amil Zakat (BAZ), juga yang dikukuhkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Gubernur Sumatera Utara untuk kategori Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Khusus untuk kategori LAZ, bahwa lembaga, panitia, atau amil zakat masyarakat Kota Medan yang berada di bawah naungan BKM-BKM tersebut tidak atau belum menyesuaikan diri dengan kehendak Undang-Undang untuk menjadi LAZ yang legal, dikarenakan: 1. Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh satu lembaga, panitia, atau amil zakat agar dikukuhkan oleh pemerintah menurut peraturan perundang-undangan menjadi satu LAZ yang legal atau sah adalah harus mampu menghimpun dana dalam satu tahun untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah), dan harus dibuktikan dengan bukti-bukti pembukuan penerimaan atau perolehan dua tahun. 2. Bahwa dengan syarat tersebut di atas, panitia-panitia/amil zakat di berbagai masjid yang ada di Kota Medan tak satupun yang mencapai angka tersebut pada setiap tahunnya dalam penerimaan atau perolehan dana zakat mereka. Inilah faktor yang paling dominan yang menjadi penghambat bagi panitia-panitia, lembaga-lembaga, atau amil-amil zakat yang ada di kota Medan ini untuk melakukan proses legalisasi. Oleh karena tidak ada yang mampu memenuhi syarat tersebut, tentu berkonsekuensi kepada tidak ada lembaga, panitia, atau amil zakat masyarakat di bawah naungan BKM-BKM di Kota Medan yang dilegalisasi. 3. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat tentang proses pelegalisasian kepanitiaan zakat menurut peraturan perundang-undangan, yang berarti juga kurang sosialisasi dari pemerintah. 4. Peraturan perundang-undangan tidak ada mengatur secara spesifik mengenai pelegalan kepanitiaan zakat masyarakat yang berada di bawah naungan Badan Kenaziran Masjid (BKM) tersebut. Hal ini berarti negara belum mengakomodasi dan mengayomi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya di bidang pengelolaan zakat pada tingkat bawah atau yang berada di masjid-masjid.

Solusi yang dilakukan oleh masyarakat (Badan Kenaziran-Badan Kenaziran Masjid) di Kota Medan dalam rangka upaya legalisasi lembaga, panitia, atau amil zakat mereka itu selama ini

adalah dengan jalan meminta pengesahan dan pen-SK-an dari Kantor Urusan Agama sebagai bentuk tauliyah dari pemerintah, tentu upaya yang mereka pahami sebagai solusi ini tidak memberi akibat hukum apa-apa. Artinya, sekalipun lembaga, panitia, atau amil zakat itu di SK-kan atau ditauliyahkan oleh Kantor urusan Agama (KUA), lembaga, panitia, atau amil zakat itu tetap tidak terlegalisasi sehingga tetap tidak legal. Sebab KUA bukan lembaga pemerintah yang berwenang mengukuhkan atau mentauliyahkan para pengelola zakat untuk menjadi satu Lembaga Amil Zakat (LAZ), bahkan juga untuk BAZ sekalipun. Yang berwenang melegalkan BAZ untuk tingkat yang paling rendah yaitu di kecamatan - dimana panitia zakat masyarakat yang berada di bawah BKM-BKM itu berada di kelurahan-kelurahan atau bahkan di lingkungan - adalah Camat, atau Ketua BAZ untuk UPZ. Dan yang berwenang melegalkan LAZ untuk tingkat Propinsi sebagai tingkat paling rendah dalam LAZ adalah Gubernur atau usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

B. Saran

1. Oleh karena peraturan perundang-undangan dipandang tidak ada mengatur dan menyahuti kepentingan dan kebutuhan lembaga, panitia, atau amil zakat masyarakat khususnya yang berada di bawah naungan Badan Kenaziran Masjid-Masjid (BKM-BKM) untuk bisa menjadi amil zakat yang legal

menurut hukum, maka pemerintah diminta dan didesak untuk melakukan suatu revisi terhadap isi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, terutama pasal-pasal yang ketentuannya menjadi kendala dan penghambat bagi proses legalisasi lembaga, panitia, atau amil zakat masyarakat itu tadi.

2. Jalan keluar atau solusi yang paling ringan dan sangat mungkin lebih cepat diwujudkan adalah dengan menjadikan amil-amil zakat di masjid-masjid tersebut sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ), namun dengan catatan, merubah sedikit ketentuan peraturan yang menggariskan UPZ tersebut dari hanya bertugas mengumpulkan dan tidak berhak mendayagunakan, menjadi diberi wewenang untuk mendistribusikan atau memberdayakan zakat tersebut.
3. Perlu ada tindakan penelitian lanjutan yang segera tentang kedudukan hukum lembaga-lebaga, panitia, atau amil-amil zakat masyarakat khususnya yang berada di bawah naungan Badan Kenaziran Masjid-Masjid menurut tinjauan perundang-undangan nasional dan hukum Islam (fikih dalam berbagai mazhabnya).

Muhammed Sa'id Tantawi, *At-Tafsir al-Wasit Li al-Qur'an al-Karim*, jilid 6 (Misir: Dar an-Nahdah, 1998).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2006).

DAFTAR BACAAN

- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 8, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967).
- Ahmad Hasyimi Beik, *Mukhtar al-Ahadis an-Nabawiyah*, (Surabaya: Muhammad bin Ahmad bin Subhan, tt.).
- A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI., *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI., 2005).
- Fakhruddin al-Razy, *At-Tafsir al-Kabir*, Jilid 16 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992).
- Muhammad Said Tantowi, *At-Tafsir al-Wasit Li al-Qur'an al-Karim*, jilid 6 (Mesir: Dar an-Nahdah, 1998).
- Peter Mamud Marzki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dan Metode-Metode Kajiannya*, Makalah Pembinaan Tenaga Peneliti, BPHN, Jakarta, 1980.

Syihabuddin al-Alusi al-Bagdadi, *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977).

Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Jilid 2, (Kudus: Menara, 1979).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Teknis Pengelolaan Zakat
 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan
 Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman
 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38
 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun
 Tentang Pengelolaan Zakat
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999

1979)
 Zaimuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in, Jilid 2, (Kudus: Menara,
 1977)
 Yan Parnadya Puspita, Kunnus Hikmah, (Semarang: Aneka Ilmu,
 Balai Pustaka, 1982).
 W.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:
 Qura' al-'Azim, Juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)
 Syahbudin al-Ahadi al-Baghdadi, Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-

Jakarta, 1980.
 Kojima, Makalah Pembinaan Tenaga Penelitian BPHN,
 Soetandyo Wigjoseptono, Hikmah Dan Metode-Metode
 Sayyid Sabid, Fiqh al-Sunan, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)

PENERIM LINDAN PENDISTRIBUSIAN "AKAT FITRAH
 KOTA MEDAN TAHUN 2005 M/1426 H

NO	KECAMATAN	PENERIMAAN			PENDISTRIBUSIAN			KETERANGAN
		Jlh. Muzakki	Beras	Uang	Jlh. Mustahik	Beras	Uang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Medan Kota	7.453	5.498,4	68.230.000	251	351	132.010.000	
02	Medan Timur	77.212	59.432,4	552.000.000	25.000-	59.432,4	552.000.000	
03	Medan Barat	44.726	79.920	132.657.000	315	29.600	155.000	
04	Medan Baru	18.347	3.950	46.438.400	1.262	3.950	46.438.400	
05	Medan Belawan	3.643	3.277,3	24.768.340	1.596	3.277,3	24.768.340	
06	Medan Labuhan	28.870	77.949	-	7.252	-	-	
07	Medan Deli	175.961	12.003	-	2.137	-	-	
08	Medan Sunggal	55.185	10.920	115.417.800	3.631	1010.902	135.414.150	
09	Medan Tuntungan	50.643	83.102	117.024.400	14.380	33,2	127.700	
10	Medan Denai	26.949	727.635	228.431.750	10.768	48,6	153.000.	
11	Medan Johor	47.162	12.830	114.507.000	4.755	12.830,4	507.000	
12	Medan Amplas	19.930	251.729	118.238.290	3.996	251.729	118.238.290	
13	Medan Tembung	20.126	18.782	99.192.000	5.493	18.797	99.192.000	
14	Medan Helvetia	69.736	19.151,8	328.122.950	5.349	19.151,8	328.122.950	
15	Medan Petisah	36.301	2.972,2	12.471.000	8.878	2.972,2	12.471.000	

51	Wakaf Jarak	20.005	25.000.000	128.282.000	3.202	21.282.000	128.282.000
52	Wakaf Jarak	20.220	25.100.000	131.088.000	3.325	25.000.000	131.088.000
10	Wakaf Jarak	20.000	25.000.000	93.030.000	3.210	25.000.000	93.030.000
12	Wakaf Jarak	21.181	25.000.000	113.010.000	2.940	25.000.000	113.010.000
13	Wakaf Jarak	21.423	25.000.000	113.010.000	3.103	25.000.000	113.010.000
19	Wakaf Jarak	20.001	25.000.000	113.010.000	3.332	25.000.000	113.010.000

LAPORAN PEMBENTUKAN BAZ / LAZ DAN UPZ **Se- SUMATERA UTARA**

BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI, ZAKAT DAN WAKAF
KANWIL DEP. AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2006

PEMBENTUKAN PENGURUS BAZ / LAZ DAN UPZ PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA	ALAMAT	NO. SK & TGL	NAMA PENGURUS	KETERANGAN
1	Bazda Provinsi Sumatera Utara	Jl. William Iskandar, Medan Telp. (061) 6617626 - 6617580	SK GUBSU No.451.12/1037/K/2004 Tgl. 10 Juni 2004	Ketua : Sekda Prov. Sum. Utara (Drs.H.Muhyar Tambuse) Sekretaris : Drs.H.Syariful Mahya Bandar,MAP	
2	LAZ Al Hijrah Sumut	Jl. Ismailiyah No. 47, Medan Telp. (061) 77842767	SK GUBSU No.451.12/194/K/2002 Tgl. 10 Januari 2002	Direktur : H. Asmuis Lubis	
3	LAZ Peduli Ummat Waspada	Gedung Waspada Jl./ Brigjen Katamso No. 1 Medan Telp. (061) 4511936	SK GUBSU No.451.12/4705/K/2002 Tgl. 28 Juni 2002	Ketua Badan Pelaksana : Ir. H. P. Simatupang	



